

**%FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh:

**Tyahayu Pratiwi
19.52.21.281**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Oleh :

Tyahayu Pratiwi
NIM. 19.52.21.281

Sukoharjo, 10 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.
NIP. 19800712201403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyahayu Pratiwi
Nim : 195221281
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2018-2020)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti atau dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 April 2023



Tyahayu Pratiwi

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tyahayu Pratiwi
Nim : 195221281
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2018-2020)”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari www.djpk.kemenkeu.go.id. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 10 April 2023



Tyahayu Pratiwi

Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Tyahayu Pratiwi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tyahayu Pratiwi Nim: 19.52.21.281 yang berjudul:

“FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2018-2020)”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 April 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.
NIP. 19800712201403 1 003

PENGESAHAN

FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-2020)

Oleh:

TYAHAYU PRATIWI
NIM. 19.52.21.281

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 M/ 15 Syawal 1444 H dan dinyatakan telah
memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
NIP. 19740302 200003 2 003



Penguji II
Frank Aligarh, S.Pd., M.Sc.
NIP. 19920912 201903 1 011



Penguji III
Fahri Ali Ahzar, S.E., M.Si.
NIK. 19910513 201701 1 124



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmayan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Allah Swt. hendaknya kamu berharap”.

(Q.S. Al-Insyiroh: 6-8)

“Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”.

(BJ. Habibie)

“Jangan bermain sama nasib kamu sendiri, lakukan dengan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan”.

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohiim

Dengan rahmat Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Kupersembahkan karyaku ini untuk :

Ibuku Rofinggatun dan bapakku Bustam tersayang, terimakasih untuk segala doa,
perhatian, kasih sayang dan dukungannya yang tiada henti

Kakakku Aditya Pratama yang selalu mendoakan dan memberikan semangat

Sahabatku (Lutfi, Riska, Nisa dan Bicil) yang selalu memberikan warna dalam
kehidupan penulis

Teman-temanku Akuntansi Syariah G dan A 2019

Almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2018-2020)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Khairul Imam, S.H.I., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si, selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Ibu Devi Narulitasari, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP , selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu dan Bapakku, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Kakakku tercinta Aditya Pratama yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Sahabatku Lutfiana Cahya Ningrum dan Riskamprettt terimakasih atas dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi.
11. Teman-temanku angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang mendoakan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 April 2023

Tyahayu Pratiwi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of balancing fund, local government measurement, local government expenditure and financial capital expenditure toward financial performance of the local government. This research is a quantitative research. The performance measurement that is used in this research is the ratio of regional independence.

This research used were secondary data from the budget realization report and pair of scale. The population in this study were all District/Cities in Central Java in 2018-2020. The research used purposive sampling technique. The final sample was obtained as many as 105 data. The analysis technique used panel data regression analysis using the Eviews 12 program.

The result showed that balance fund had a negativ effect toward financial performance of local government, local government measurement and local government expenditure had a positive effect toward financial performance of local government while financial capital expenditure had no effect toward financial performance of local government.

Keywords: financial performance, balancing fund, local government measurement, local government expenditure, financial capital expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Ukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran dan neraca. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling* diperoleh sampel sebanyak 105 data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan program Eviews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : kinerja keuangan, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, belanja modal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.1 Batasan Masalah.....	11
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Jadwal Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	12

BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1. Kajian Teori.....	14
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Teori).....	14
2.1.2 Laporan Keuangan	16
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.1.4 Dana Perimbangan	19
2.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah	19
2.1.6 Belanja Daerah	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Berfikir.....	33
2.4 Perumusan Hipotesis	34
2.4.1 Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	34
2.4.2 Ukuran Pemerintah Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	35
2.4.3 Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
2.4.4 Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	39
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel.....	40
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	40
3.4 Data dan Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Variabel Penelitian	41

3.7	Definisi Operasional Variabel	42
3.7.1	Variabel Dependen	42
3.7.2	Variabel Independen.....	42
3.8	Teknik Analisis Data	43
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.8.2	Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	44
3.8.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel	45
3.8.4	Uji Asumsi Klasik	46
3.8.5	Uji Ketepatan Model	48
3.8.6	Analisis Model Regresi Data Panel	49
3.8.7	Uji Hipotesis.....	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Gambaran Umum Penelitian	51
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	52
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.2.2	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	54
4.2.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel	56
4.2.4	Uji Asumsi Klasik	58
4.2.5	Uji Ketepatan Model	61
4.2.6	Hasil Analisis Uji Regresi Data Panel	63
4.2.7	Uji Hipotesis.....	64
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data	66
4.3.1	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	66
4.3.2	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	68
4.3.3	Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	70

4.3.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	72
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Keterbatasan Penelitian	75
5.3 Saran-saran	75
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	33
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Dan Keuangan Daerah	3
Tabel 1.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	3
Tabel 1.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 4.1 Data Pemilihan Sampel.....	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Model <i>Common Effect</i>	55
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Model <i>Fixed Effect</i>	55
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Model <i>Random Effect</i>	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	61
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	62
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Model <i>Fixed Effect</i>	63
Tabel 4.15 Hasil Uji t.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	82
Lampiran 2 : Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	83
Lampiran 3 : Data Mentah Penelitian Variabel Kinerja Keuangan Daerah.....	84
Lampiran 4 : Data Mentah Penelitian Variabel Dana Perimbangan	87
Lampiran 5 : Data Mentah Penelitian Variabel Ukuran Pemerintah Daerah.....	90
Lampiran 6 : Data Mentah Penelitian Variabel Belanja Daerah.....	93
Lampiran 7 : Data Mentah Penelitian Variabel Belanja Modal	96
Lampiran 8 : Variabel Independen dan Variabel Dependen	99
Lampiran 9 : Hasil Uji Statistik Deskriptif	102
Lampiran 10 : Hasil Uji Common Effect Model	102
Lampiran 11 : Hasil Uji Fixed Effect Model	103
Lampiran 12 : Hasil Uji Random Effect Model.....	104
Lampiran 13 : Hasil Uji Chow	104
Lampiran 14 : Hasil Uji Hausman	105
Lampiran 15 : Hasil Uji Normalitas	105
Lampiran 16 : Hasil Uji Multikolinearitas	105
Lampiran 17 : Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	106
Lampiran 18 : Hasil Uji Autokorelasi.....	106
Lampiran 19 : Hasil Uji F	106
Lampiran 20 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	106
Lampiran 21 : Hasil Uji t	107
Lampiran 22 : Daftar Riwayat Hidup.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi organisasi secara pribadi dan organisasi (Andjarwati et al., 2021). Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya yaitu kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah perorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, termasuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor belanja daerah, yaitu seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah (Harjito et al., 2020).

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah, salah satunya adalah menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Pendapat Asli Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Andjarwati et al., 2021)

Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan atau anggaran pendapatan asli daerah (Putra, 2018). Semakin besar realisasi penerimaan pendapatan asli daerah maka dapat dikatakan semakin efektif.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% (Fathah, 2017). Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan melalui besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah (Andjarwati et al., 2021). Jadi, semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Berikut ini disajikan Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah :

Tabel 1.1

Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Dwiranda, 2007

Royda & Riana, (2019) berargumen desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan dan pengelolaan fiskal. Desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam hal ini adalah dari segi fiskal.

Kriteria lain untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri adalah dengan cara melihat kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Berikut ini adalah acuan dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah :

Tabel 1.2

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Anita Wulandari, 2001

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan cara melihat rasio kemandirian keuangan pada pemerintah daerah.

Tabel 1.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Nama Daerah	2018	2019	2020
Kab. Banjarnegara	0,11	0,12	0,12
Kab. Banyumas	0,20	0,20	0,20
Kab. Batang	0,14	0,14	0,15
Kab. Blora	0,10	0,11	0,14
Kab. Boyolali	0,15	0,17	0,19
Kab. Brebes	0,12	0,12	0,13
Kab. Cilacap	0,17	0,17	0,19
Kab. Demak	0,16	0,17	0,19
Kab. Grobogan	0,13	0,13	0,14
Kab. Jepara	0,16	0,16	0,18
Kab. Karanganyar	0,16	0,18	0,18
Kab. Kebumen	0,13	0,15	0,15
Kab. Kendal	0,16	0,16	0,17
Kab. Klaten	0,15	0,12	0,13
Kab. Kudus	0,17	0,16	0,19
Kab. Magelang	0,14	0,16	0,14
Kab. Pati	0,14	0,13	0,14
Kab. Pekalongan	0,15	0,16	0,17
Kab. Pemalang	0,12	0,13	0,13
Kab. Purbalingga	0,15	0,15	0,16
Kab. Purworejo	0,14	0,13	0,14
Kab. Rembang	0,17	0,17	0,17
Kab. Semarang	0,18	0,19	0,20
Kab. Sragen	0,15	0,16	0,18
Kab. Sukoharjo	0,21	0,21	0,23
Kab. Tegal	0,15	0,16	0,17
Kab. Temanggung	0,15	0,15	0,17
Kab. Wonogiri	0,12	0,12	0,12
Kab. Wonosobo	0,12	0,12	0,13
Kota Magelang	0,28	0,28	0,31
Kota Pekalongan	0,20	0,22	0,24
Kota Salatiga	0,23	0,25	0,25
Kota Semarang	0,43	0,45	0,46

Kota Surakarta	0,28	0,28	0,27
Kota Tegal	0,28	0,28	0,26

Sumber: Data diolah

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Andjarwati et al., 2021). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian daerah menunjukkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama 3 tahun pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masih dalam kategori rendah sekali (RS) dengan pola hubungan instruktif artinya kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masih tergantung dengan pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dalam skala interval untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir masih sangat kurang karena masih dalam skala interval 0,00% - 10,00%. Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah mempunyai kemampuan yang masih rendah dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masih relative kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya.

Ada banyak faktor penentu pada kinerja keuangan pemerintah daerah, antara lain dana perimbangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pembiayaan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah memberikan informasi terkait dengan seberapa besar atau kecil pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan besarnya aset dalam suatu daerah (Aulia & Rahmawaty, 2020). Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka bisa meningkatkan pendapatan asli daerah jika pemerintah mampu mengelola sumber potensi daerahnya dengan baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.

Selain belanja daerah, belanja modal juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sari & Aztisya, (2022) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan fasilitas yang dibangun.

Penelitian yang dilakukan oleh Antari & Sedana, (2018) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, (2018) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Verawaty et al., (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda, (2019) tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Salsabilla & Rahayu, (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh *wealth*, *leverage* dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *wealth*, *leverage* dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Nugraheni & Adi, (2020) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, pendapatan pajak daerah dan temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati et al., (2021) tentang *analysis of local own revenue and balancing funds on the financial performance of districts and cities in the region of east java province*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Aulia & Rahmawaty, (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Harjito et al., (2020) tentang analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia, sedangkan dana alokasi umum dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Sari & Aztisya, (2022) melakukan penelitian tentang *determinants of local government financial performance*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas, maka peneliti mengkaji lebih dalam apakah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menambahkan variabel independen berupa ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dan pajak daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Andjarwati, Endah Budiarti, Pramita Studiviany Soemadijo, dan Muhammad Yasin yaitu “*Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province*”, yang memberikan hasil bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan variabel ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dan belanja modal dalam melakukan penelitian dan data penelitian diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (APBD) dan Neraca di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui situs www.djpkemenkeu.go.id.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH**” (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

Kemandirian keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih dalam kategori rendah. Hal ini berdasarkan dari data yang diolah dan diperoleh dari situs www.djpk.kemenkeu.go.id

1.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai kefokusannya maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Menguji secara empiris ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Menguji secara empiris belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Menguji secara empiris belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai arahan dalam memudahkan dalam penelitian ini, penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah mengenai dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi agar memudahkan para pembaca untuk memahami skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori, variabel yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini, meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel yang digunakan, data dan sumber data, variabel penelitian, dan teknik analisa data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Hasil analisis dengan metode penelitian yang digunakan serta uraian hasil yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu guna dijadikan penelitian sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Teori)

Organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory* (Harjito et al., 2020). Teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik, masalah keagenan terjadi antara pemerintah daerah yang berperan sebagai *agent* dan rakyat yang berperan sebagai *principal* yang menyerahkan keusaannya agar dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya dalam hal penggunaan dana yang bersumber dari negara kepada masyarakat.

Menurut Lane, (2003) *agent* dan *principal* merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi yaitu terdapat beberapa *principal* dengan masing-masing tujuan dan *principal* juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan daerah bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan *principal* saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah.

Pada organisasi sektor publik, hubungan keagenan dapat dilihat dalam penyusunan anggaran yang diserahkan ke pusat. Setelah adanya pengesahan dari pusat, pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah disusun. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah *agent*, sedangkan legislatif adalah *principal* (Halim, 2014). Tujuan *principal* harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai *agent* (pengelola keuangan pemerintah daerah) yang harus menetapkan pilihan tertentu agar dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya dalam hal penggunaan dana yang bersumber dari negara kepada masyarakat. sebagai pihak *principal*. Pihak *principal* tentu mengharap *agent* untuk memberikan hasil yang memuaskan.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah gambaran tentang neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan yang sehat (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Menurut Pramono, (2014) aktivitas ekonomi di Indonesia dapat dibagi ke dalam sektor privat, sektor publik, dan sektor nirlaba. Khususnya di sektor publik dikenal adanya dua entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 standar akuntansi pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas;
- g. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Andjarwati et al., (2021) kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, mewujudkan tujuan visi, dan misi baik secara pribadi maupun organisasi, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah jumlah pendapatan dan pengeluaran selama periode anggaran tertentu dan dihitung menurut sistem keuangan daerah yang ditetapkan oleh kebijakan atau berdasarkan undang-undang (Sari, 2016). Keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan kinerjanya secara ekonomi dapat menjadi tolak ukur kesiapannya dalam melaksanakan otonomi.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menginformasikan pengambilan keputusan manajerial dan mengukur tingkat kepuasan karyawan dan pelanggan (Mardiasmo, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio kemandirian dapat menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu membayar kebutuhan atau biaya secara mandiri atas kegiatan operasional yang dilakukan dan tugas daerah tanpa atau sedikit berharap pada sumber dana pihak luar, baik melalui pinjaman maupun dari pemerintah pusat (Andjarwati, 2021). Adapun pola hubungan untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu pemerintah daerah dipandang sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat menyusut karena otonomi pada suatu daerah sudah meningkat dan dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu pemerintah pusat sudah tidak ikut campur karena pemerintah daerah sudah mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka (Andjarwati et al., 2021). Dana transfer adalah nama lain dari dana perimbangan. Dana ditransfer karena kesenjangan ekonomi dan keuangan antar daerah tidak merata. Selain itu transfer juga mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, mengatasi dampak layanan publik antar daerah, dan menciptakan stabilitas ekonomi daerah (Sandi, 2020).

Berikut ini yang termasuk dalam dana perimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

1. Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari APBN berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum, adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus.

2.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Seberapa besar sebuah pemerintah di suatu wilayah dapat disimpulkan dengan melihat ukuran daerahnya. Semakin besar ukuran dalam suatu daerah,

semakin sedikit upaya yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan operasional dan pendapatan bagi daerahnya. Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara tidak langsung apabila pemerintah sanggup mengelolanya dengan baik (Aulia & Rahmawaty 2020). Pemerintah yang memiliki ukuran daerah besar berarti mempunyai tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan.

Ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, sebaliknya jika ukuran pemerintah daerah kecil maka pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya (Asmaul, 2016). Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset daerah. Untuk dapat memberikan pendapatan yang besar bagi masyarakat maka perlu mempertahankan aset yang cukup besar.

2.1.6 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Belanja daerah harus digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah

dikhususkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pendidikan, fasilitas sosial, kesehatan dan fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial (Harjito et al., 2020).

2.1.7 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti tanah, gedung dan bangunan.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah dengan adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pendapatan untuk daerah (Sari & Aztisya, 2022). Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal yang terdapat pada APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah sesuai dengan prioritas anggaran untuk kepentingan publik yang memberikan dampak jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah serangkaian penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Julitawati, Darwanis, dan Jalaludin (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh	Kuantitatif Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Populasi: Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Sampel: Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2.	Sri Mulyani dan Hardiyanto	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah,	Kuantitatif Dependen:	Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja

	Wibowo (2017)	<i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	<p>Kinerja Keuangan</p> <p>Independen: Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Populasi: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Sampel: 105 Kabupaten/Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sedangkan variabel <i>intergovernmental revenue</i> , ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
3.	Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, Dr. M Shabri (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh.	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan</p> <p>Independen: Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli</p>	Belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.

			<p>Populasi: Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh</p> <p>Sampel: 23 Kabupaten dan Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	
4.	Armaja, Ridwan Ibrahim, Aliamin (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Aceh	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan</p> <p>Independen: Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah</p> <p>Populasi: Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh</p> <p>Sampel: 23 Kabupaten dan Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis</p>	Kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.

			Regresi Linier Berganda	
5.	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira, (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah</p> <p>Populasi: Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Sampel: 33 Kabupaten dan Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Berganda Aplikasi STATA (<i>Statistic Data Analysis</i>) Versi 16</p>	Pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Marfiana dan Kurniasih	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen:</p>	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah,

	(2013)	dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	<p>Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, opini audit, tingkat ketergantungan dan jumlah belanja daerah</p> <p>Populasi: Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa</p> <p>Sampel: 94 Kabupaten/ Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa, sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa.
7.	Tri Andjarwati, Endah Budiarti, Pramita Studiviany Soemadijo, dan Muhammad Yasin (2021)	<i>Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province</i>	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: <i>Regional Financial Performance</i></p> <p>Independen: <i>Regional Original</i></p>	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

			<p><i>Income, Balanced Fund</i></p> <p>Populasi: Wilayah Provinsi Jawa Timur</p> <p>Sampel: 38 Kabupaten dan Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Regresi <i>Partial Least Square</i> (PLS)</p>	
8.	Rafika Aulia dan Rahmawaty (2020)	Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah</p> <p>Populasi: Seluruh</p>	Kemakmuran pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

			<p>Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh</p> <p>Sampel: 23 Kabupaten/ Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Program SPSS Versi 23.</p>	
9.	Yunus Harjito G, Putra Surya Nugraha, dan Yulianto (2020)	Aalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah</p> <p>Populasi: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia</p> <p>Sampel: 416 Kabupaten dan 98 Kota</p>	<p>Pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sedangkan dana alokasi umum dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.</p>

			<p>Teknik Analisis Data: Model Estimasi Regresi Data Panel yang dilakukan Melalui <i>Uji Chow</i> dan <i>Uji Hausman</i>.</p>	
10.	Berti Indah Sari dan Halmawati, (2021)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah</p> <p>Populasi: Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Sampel: 19 Kabupaten/Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier</p>	<p>Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.</p>

			Berganda	
11.	Ni Made Diah Permatasari dan I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal</p> <p>Populasi: Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung</p> <p>Sampel: Kabupaten Bandung</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Linier Regresi Berganda SPSS Versi 24</p>	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
12.	Sheila Salsabila, dan Sri Rahayu (2021)	Pengaruh Wealth, Leverage, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen:</p>	<i>Wealth, leverage,</i> dan belanja daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

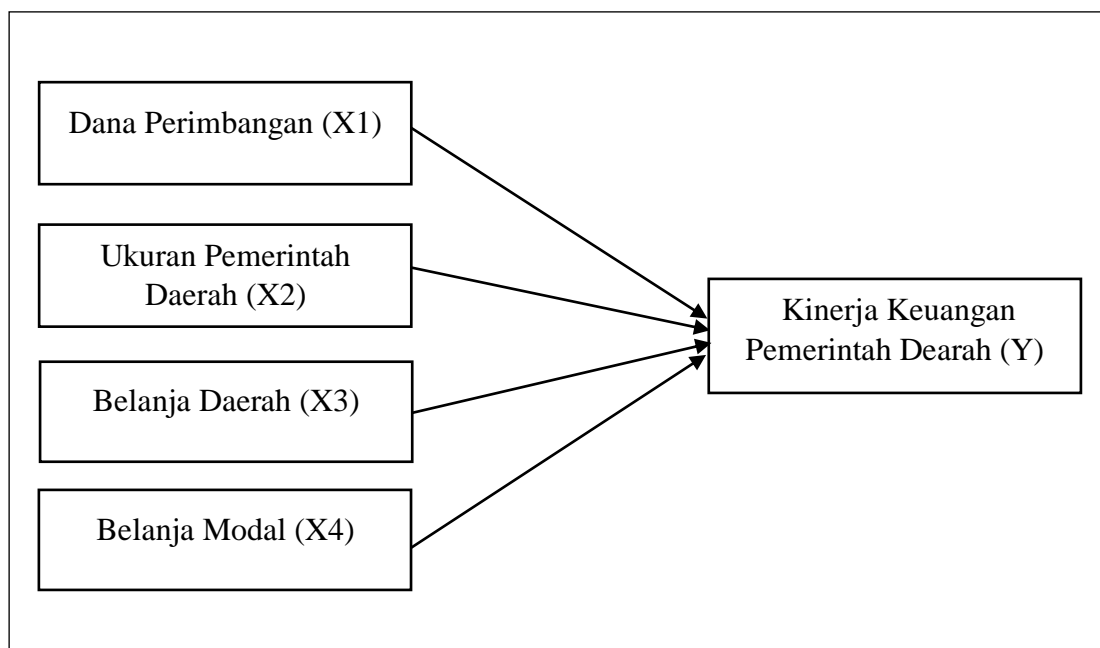
			<p>Wealth, Leverage, dan Belanja Daerah</p> <p>Populasi: Pemerintah Daerah di Indonesia</p> <p>Sampel: 34 Provinsi</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda SPSS Versi 25</p>	
13.	Rosita Wulandari, (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Belanja Daerah</p> <p>Populasi: Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia</p> <p>Sampel: 34 Provinsi</p>	Pajak daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

			Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda	
14.	Maya Sari & Arum Aztisyah, (2022)	<i>Determinants of Local Government Financial Performance</i>	<p>Kuantitatif</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal</p> <p>Populasi: Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Sampel: 33 Kabupaten/ Kota</p> <p>Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori tersebut, selanjutnya kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan selain digunakan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah juga memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimiliki (Andjarwati et al., 2021). Sebagai daerah penghasil pemerintah daerah berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya. Artinya pemerintah daerah masih mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

Menurut teori agensi menjelaskan bahwa sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya. Sehingga dengan meningkatkan pendapatan daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah (Sari & Aztisya, 2022)

Andjarwati et al., (2021) dan Armaja, (2015) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa, (2016) dan Alexander (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jika pemerintah daerah menerima saldo kecil, maka tidak sepenuhnya bisa mendanai kegiatan operasionalnya sehingga kinerja yang dihasilkan kurang optimal. Disini menunjukkan bahwa semakin besar pendanaan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah dalam menjalankan kinerja keuangannya.

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Ukuran Pemerintah Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang ditentukan oleh total aset merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, karena semakin besar pemerintah semakin diprediksi dapat mengumpulkan pendapatan asli daerah secara tidak langsung (Aulia & Rahmawaty, 2020). Pemerintah daerah dengan total aset yang besar diharapkan dapat memiliki potensi untuk memberikan pendapatan yang lebih besar terhadap masyarakat.

Hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yaitu dengan jumlah aset yang lebih besar diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah aset yang lebih sedikit. Tercapainya tujuan pemerintah melalui kinerja yang dilakukan dalam mengelola aset dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat

Penelitian Marhawai, (2015), Masdiantini & Erawati, (2016), dan Sari, (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang sejalan dengan ini adalah Imiyyah et al., (2017), Alvini, (2018), dan Aulia & Rahmawaty, (2020)

yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah yang besar memudahkan dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga aset yang akan diberikan kepada masyarakat semakin baik. Disini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.3 Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan otonomi memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola sendiri daerahnya dan mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya, sehingga kinerja keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan baik (Harjito et al., 2020). Secara teori, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kinerja keuangan daerah yang optimal dapat tercapai apabila pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja daerahnya dengan baik.

Menurut teori agensi menjelaskan bahwa melalui pengalokasian belanja daerah yang memadai, kualitas kinerja keuangan dapat ditingkatkan sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya. Pemerintah daerah sebagai

pihak yang mengelola dan menjalankan fungsi dalam pemerintahan harus bertanggungjawab dalam mengelola belanja daerah dengan baik (Janah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Garini, (2015) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Aliamin et al., (2015) dan Harjito et al., (2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Apabila belanja daerah tinggi maka kualitas pendapatan daerah sudah baik. Disini menunjukkan bahwa semakin besar pengalokasian belanja daerah maka semakin baik kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H3 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.4 Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara yang tercermin dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah (Sari & Aztisya, 2022). Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan.

Dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Menurut teori agensi menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan fasilitas yang dibangun, sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik (Sari & Aztisya, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Hapsari, (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto, (2019) dan Sari & Aztisya, (2022) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Besarnya belanja modal merupakan cerminan dari pembangunan aset tetap. Semakin banyak pembangunan yang bisa menghasilkan pendapatan maka semakin baik kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H4 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama bulan September sampai dengan penelitian selesai. Alasan waktu tersebut dipilih karena waktu tersebut digunakan untuk melakukan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian, karena penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel untuk menjawab masalah penelitian. Menurut Sugiyono, (2017) metode kuantitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan apa yang menjadi faktor penentu pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi

dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (APBD) dan Neraca di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono, (2017) sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2018-2020, dengan jumlah sampel sebanyak 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dimana diperoleh sampel sebanyak 105 data.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (APBD) dan Neraca pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Laporan Realisasi Anggaran (APBD) dan Neraca pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018-2020.

3.4 Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung

keperluan data primer seperti, buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi APBD dan Neraca dari 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Menurut Hamidi, (2004) teknik dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumen dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen sering disebut juga variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen sering disebut juga variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, dan pajak daerah.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen sering disebut juga variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah merupakan sebuah rasio yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung atau mengandalkan sumber dana yang berasal dari pihak luar seperti dari pusat atau pinjaman (Andjarwati et al., 2021).

Darwanis & Saputra, (2014) menyatakan apabila rasio kemandirian daerah bernilai tinggi mengindikasikan kebergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana yang berasal dari luar semakin rendah yang artinya pemerintah sudah mandiri. Begitu juga sebaliknya, untuk mengukur rasio ini diperoleh dari hasil pembagian antara total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan (Andjarwati et al., 2021).

3.7.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen sering disebut juga variabel bebas (Sugiyono, 2017).

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$

	kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya (Andjarwati et al., 2021).	
Dana Perimbangan	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Andjarwati et al., 2021).	Ln (Dana Perimbangan)
Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi dalam pemerintahan (Aulia & Rahmawaty, 2020).	Ln (Total Aset)
Belanja Daerah	Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah (Aulia & Rahmawaty, 2020)	Ln (Belanja Daerah)
Belanja Modal	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sari & Aztisya, 2022).	Ln (Belanja Modal)

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program EViews. Terdapat beberapa tahap dalam menganalisis data ini,

dengan statistik deskriptif. Tahap yang pertama dengan cara input data, selanjutnya dengan estimasi model. Terdapat tiga estimasi model atau regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, *random effect model*. Selanjutnya, dalam menentukan estimasi data panel yang tepat dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Tahap kedua melakukan analisis regresi linier berganda.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Menurut Ghozali & Ratmono (2017) statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu data variabel dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, serta *skewness* (kemencengan distribusi).

3.8.2 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model regresi data panel, terdapat tiga model pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*.

1. *Common Effect Model*

Common Effect merupakan pendekatan yang paling sederhana yang sering disebut dengan estimasi CEM atau *Pooled Least Square*. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu ataupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* dalam bentuk *pool* (kelompok). Estimasi yang digunakan yaitu kuadrat terkecil (*Pooled Least*

Squared) (Ghozali & Ratmono, 2017).

2. *Fixed Effect Model*

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasikan melalui perbedaan intersepnya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effect*, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi menggunakan variabel dummy. Salah satu cara memperhatikan unit *cross section* pada model regresi data panel adalah dengan mengizinkan nilai intersep berbeda-beda untuk setiap unit *cross section* tetapi masih mengasumsikan slope koefisien tetap (Ghozali & Ratmono, 2017).

3. *Random Effect Model*

Berbeda dengan *fixed effect model*, efek spesifik dari masing-masing individu diberlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan model *Random Effect Model (REM)* (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.8.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang diestimasi akan dipilih mana model yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tahapan uji yang dapat dijadikan alat untuk memilih model (CEM, FEM atau REM), berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk pemilihan model

Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas F signifikan, apabila nilai probabilitas $F < 0,05$ maka model FEM lebih baik dibandingkan dengan CEM. Apabila probabilitas F signifikan $> 0,05$ maka model CEM lebih baik dibandingkan dengan FEM.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk pemilihan model *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan probabilitas *Chi-Square* dengan signifikan. Apabila nilai *chi-square* $< 0,05$ maka model FEM lebih baik dibandingkan dengan REM. Apabila *chi-square* $> 0,05$ maka model REM lebih baik dibandingkan FEM.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier merupakan uji yang digunakan untuk memilih model *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini dilakukan apabila dalam pengujian uji Chow yang diterima adalah *Common Effect Model* (CEM).

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian normalitas dapat menggunakan uji statistic *Jarque-Bera Test*. Uji normalitas dengan metode *Jarque-Bera* dapat diketahui jika data normal dengan melihat nilai probability $> 0,05$ maka data dapat dikatakan data terdistribusi normal. Dimana uji *Jarque-Bera* didapat dari histogram normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelas tinggi atau sempurna antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinear pada penelitian. Hasil uji multikolineritas dapat ditunjukkan dengan nilai correlation antar variabel independen $< 0,90$ maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas (Ghozali & Ratmono, 2017).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk penelitian ini menggunakan *uji glejser*. Data

dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probability $> 0,05$ (Ghozali & Ratmono, 2017).

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali & Ratmono, (2017) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam penelitian ini menggunakan Serial Correlation (LM Test). Dimana jika Durbin-Watson stat terletak diantara dU dan $4-dU$ maka tidak ada autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.8.5 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Adapun kriteria pengambilan keputusan dari uji F yaitu:

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi seluruh variabel bebas (independen) dapat menerangkan variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai koefisien determinasi

maka semakin besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat begitu juga sebaliknya (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.8.6 Analisis Model Regresi Data Panel

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Model regresi data panel bertujuan untuk mengukur sejauh mana kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih menunjukkan arah hubungan dengan variabel dependen. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KKD = \alpha + \beta_1 DP_1 + \beta_2 UPD_2 + \beta_3 BD_3 + \beta_4 BM_4 + e$$

Keterangan :

KKD : Kinerja Keuangan Pemerintah

α : Konstanta

$\beta_1 DP_1$: Dana Perimbangan

$\beta_2 UPD_2$: Ukuran Pemerintah Daerah

$\beta_3 BD_3$: Belanja Daerah

$\beta_4 BM_4$: Belanja Modal

e : Koefisien error

3.8.7 Uji Hipotesis

Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali & Ratmono, 2017). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t dengan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$) yaitu sebagai berikut :

- a. Jika $\alpha < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $\alpha > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan sampel dari Laporan Realisasi Anggaran (APBD) dan Neraca pada tahun 2018-2020. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 105 data. Penelitian ini terdiri dari 2 jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independent.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel independen dalam penelitian ini yaitu dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal.

Data yang diteliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran (APBD) dan Neraca pada tahun 2018-2020 yang dapat diakses melalui *website* www.djpk.kemenkeu.go.id.

Tabel 4.1
Data Pemilihan sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	105
Kabupaten/Kota yang terdapat di Laporan Realisasi APBD Tahun 2018-2020	105
Jumlah Sampel Penelitian	105

Sumber data: Hasil Olah Data, 2023

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terkait data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data ini meliputi minimum, maximum, *mean* dan standar deviasi (Ghozali & Ratmono, 2017). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal. Gambaran mengenai variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	KKD	DP	UPD	BD	BM
Mean	0.177619	27.84630	29.03035	28.37458	26.45960
Median	0.160000	27.91013	28.95021	28.40658	26.54841
Maximum	0.460000	28.29389	31.06407	29.16443	27.83678
Minimum	0.100000	26.98102	28.36501	27.40582	25.34905
Std. Dev.	0.065229	0.317817	0.440318	0.338409	0.467422
Skewness	2.272439	-1.364763	2.016846	-0.953201	-0.178928
Kurtosis	9.317561	4.341931	8.766364	4.504590	3.226218
Jarque-Bera	264.9828	40.47353	216.6571	25.80445	0.784154
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000002	0.675652
Sum	18.65000	2923.862	3048.186	2979.331	2778.258
Sum Sq. Dev.	0.442505	10.50479	20.16352	11.91014	22.72227
Observations	105	105	105	105	105

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, pengujian statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai minimum 0,100000 dan nilai maksimum sebesar 0,460000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai kinerja keuangan pemerintah daerah berkisar antara 0,100000 sampai 0,460000. Nilai terendah terdapat pada Kabupaten Blora pada tahun 2018 dan nilai tertinggi terdapat pada Kota Semarang pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,177619 dan standar deviasi sebesar 0,065229.

2. Dana Perimbangan

Dari tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa variabel dana perimbangan mempunyai nilai minimum 26,98102 dan nilai maksimum sebesar 28,29389. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan berkisar antara 26,98102 sampai 28,29389. Nilai terendah terdapat pada Kota Salatiga pada tahun 2020 dan nilai tertinggi terdapat pada Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,84630 dan standar deviasi sebesar 0,317817.

3. Ukuran Pemerintah Daerah

Dari tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa variabel ukuran pemerintah daerah mempunyai nilai minimum 28,36501 dan nilai maksimum sebesar 31,06407. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berkisar antara 28,36501 sampai 31,06407. Nilai terendah

terdapat pada Kabupaten Rembang pada tahun 2018 dan nilai tertinggi terdapat pada Kota Semarang pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,03035 dan standar deviasi sebesar 0,440318.

4. Belanja Daerah

Dari tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa variabel belanja daerah mempunyai nilai minimum 27,40582 dan nilai maksimum sebesar 29,16443. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah berkisar antara 27,40582 sampai 29,16443. Nilai terendah terdapat pada Kota Pekalongan pada tahun 2020 dan nilai tertinggi terdapat pada Kota Semarang pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,37458 dan standar deviasi sebesar 0,338409.

5. Belanja Modal

Dari tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa variabel belanja modal mempunyai nilai minimum 25,34905 dan nilai maksimum sebesar 27,83678. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja modal berkisar antara 25,34905 sampai 27,83678. Nilai terendah terdapat pada Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 dan nilai tertinggi terdapat pada Kota Semarang pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,45960 dan standar deviasi sebesar 0,467422.

4.2.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Uji pemilihan model dilakukan untuk memilih model yang tepat diantara ketiga model, *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Pada tabel dibawah ini merupakan hasil pengujian dari model *common effect*.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Model *Common Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.540817	0.317444	1.703664	0.0915
DP	-0.208236	0.024195	-8.606500	0.0000
UPD	0.102328	0.009951	10.28286	0.0000
BD	0.078223	0.022611	3.459527	0.0008
BM	0.009268	0.010336	0.896690	0.3720
Root MSE	0.032366	R-squared		0.751425
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared		0.741482
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression		0.033166
Akaike info criterion	-3.928160	Sum squared resid		0.109996
Schwarz criterion	-3.801781	Log likelihood		211.2284
Hannan-Quinn criter.	-3.876949	F-statistic		75.57328
Durbin-Watson stat	0.426612	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Setelah melakukan uji *common effect*, selanjutnya melakukan uji *fixed effect*. Pada tabel dibawah ini merupakan hasil pengujian model *fixed effect* :

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Model *Fixed Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.641586	0.445901	1.438855	0.1533
DP	-0.099990	0.017472	-5.722960	0.0000
UPD	0.062984	0.008904	7.073955	0.0000
BD	0.019892	0.008998	2.210721	0.0293
BM	-0.002740	0.004291	-0.638432	0.5247
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variabls)				
Root MSE	0.007767	R-squared		0.985684
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared		0.977442
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression		0.009797
Akaike info criterion	-6.134916	Sum squared resid		0.006335
Schwarz criterion	-5.149159	Log likelihood		361.0831
Hannan-Quinn criter.	-5.735468	F-statistic		119.5859
Durbin-Watson stat	2.384704	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Dari uji *fixed effect*, selanjutnya dilakukan pengujian model *random effect*, pada tabel dibawah ini merupakan hasil pengujian model *random effect* :

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Model Random *Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.509558	0.966965	0.526967	0.6000
DP	-0.033549	0.031303	-1.071748	0.2877
UPD	0.016889	0.013230	1.276608	0.2062
BD	0.016775	0.009149	1.833412	0.0713
BM	-0.013756	0.004756	-2.892306	0.0052
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.030194	0.9047
Idiosyncratic random			0.009797	0.0953
Weighted Statistics				
Root MSE	0.011584	R-squared		0.408610
Mean dependent var	0.032705	Adjusted R-squared		0.384954
S.D. dependent var	0.015136	S.E. of regression		0.011870
Sum squared resid	0.014091	F-statistic		17.27327
Durbin-Watson stat	1.521367	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.600314	Mean dependent var		0.177619
Sum squared resid	0.176863	Durbin-Watson stat		0.121209

Sumber: Output Eviews 12, 2023

4.2.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Setelah melakukan estimasi model regresi data panel *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* maka Langkah selanjutnya yaitu pemilihan model regresi data panel.

1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan antara model *common effect* dan *fixed effect*. Jika probabilitas $F < 0,05$ maka model *fixed effect* lebih tepat untuk digunakan. Jika probabilitas $F > 0,05$ maka model *common effect* lebih tepat untuk digunakan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.764592	(34,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	299.709351	34	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai *F probability* sebesar 0,0000 yang menunjukkan nilai *F probability* $0,0000 < 0,05$ maka model *fixed effect* lebih baik untuk digunakan.

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih antara model *fixed effect* dan *random effect*. Jika probabilitas $F < 0,05$ maka model *fixed effect* lebih tepat untuk digunakan. Jika probabilitas $F > 0,05$ maka model *random effect* lebih tepat untuk digunakan.

Tabel 4.7
Hasil Uji Hasman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50.806264	4	0.0000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai *probability* sebesar 0,0000 yang artinya nilai *probability* $0,0000 < 0,05$ maka model *fixed effect* lebih tepat untuk digunakan. Apabila pada uji chow dan uji hausman sudah terpilih model yang sama dan tepat untuk digunakan maka tidak perlu melakukan Uji Langrange Multiplier.

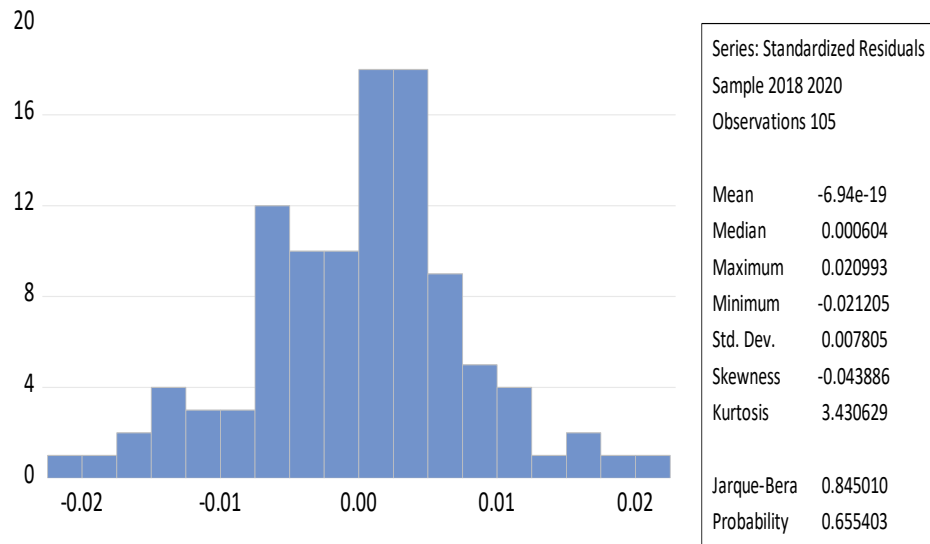
4.2.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model yang diuji telah memenuhi syarat tidak adanya masalah asumsi klasik. Untuk memenuhi kondisi tersebut harus dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian normalitas dapat menggunakan uji statistic *Jarque-Bera Test*. Uji normalitas dengan metode *Jarque-Bera* dapat diketahui jika data normal dengan melihat nilai *probability* $JB > 0,05$ maka dapat dikatakan data terdistribusi normal. Dimana uji *Jarque-Bera* didapat dari histogram normalitas (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.8 dengan uji *jarque-bera* diperoleh *probability* sebesar $0,655403 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan setiap variabel independen dalam penelitian ini. Uji multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai korelasi antar variabel, dan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai korelasinya dibawah 0,90 (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinearitas				
	DP	UPD	BD	BM
DP	1.000000	0.347598	0.875016	0.653473
UPD	0.347598	1.000000	0.515493	0.541696
BD	0.875016	0.515493	1.000000	0.610877
BM	0.653473	0.541696	0.610877	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai korelasi menunjukkan bahwa variabel-variabel independent memiliki nilai korelasi $< 0,90$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Menurut Ghozali & Ratmono, (2017) data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila *probability* $> 0,05$.

Tabel 4.10

Hasil Uji Heteroskedastisitas				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.501955	0.393497	1.275626	0.2066
KKD	-0.029521	0.049986	-0.590583	0.5568
DP	-0.021840	0.012822	-1.703333	0.0933
UPD	0.003275	0.005438	0.602216	0.5491
BD	0.000550	0.003809	0.144411	0.8856
BM	0.000256	0.002050	0.124657	0.9012

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.10 diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada tabel, *probability* dari masing-masing variabel independen $> 0,05$.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Serial Correlation (LM test). Dari uji LM dimana jika Durbin-Watson stat terletak diantara dU dan 4-dU maka tidak ada autokorelasi (Ghozali & Ratmono, 2017).

Tabel 4.11

Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	3.465207	Durbin-Watson stat	2.039022
Prob(F-statistic)	0.336824		

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.11, nilai Durbin-Watson stat adalah 2,039022. Maka $dU 1,7617 < DW 2,039022 < 4-dU 2,2383$ dapat disimpulkan bahwa pada uji autokorelasi dalam penelitian ini sama sekali tidak terdapat autokorelasi atau terbebas dari masalah autokorelasi.

4.2.5 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji f dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Model diterima apabila *probability* $< 0,05$.

Tabel 4.12

Hasil Uji F

Root MSE	0.007767	R-squared	0.985684
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared	0.977442
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression	0.009797
Akaike info criterion	-6.134916	Sum squared resid	0.006335
Schwarz criterion	-5.149159	Log likelihood	361.0831
Hannan-Quinn criter.	-5.735468	F-statistic	119.5859
Durbin-Watson stat	2.384704	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai *probability* < 0,05, yang artinya bahwa variabel dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi seluruh variabel bebas (independen) dapat menerangkan variabel terikat (dependen).

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.007767	R-squared	0.985684
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared	0.977442
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression	0.009797
Akaike info criterion	-6.134916	Sum squared resid	0.006335
Schwarz criterion	-5.149159	Log likelihood	361.0831
Hannan-Quinn criter.	-5.735468	F-statistic	119.5859
Durbin-Watson stat	2.384704	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (r^2) pada tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R-square* sebesar 0,9774, yang berarti bahwa variabel dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 97,74% sisanya 2,26% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.2.6 Hasil Analisis Uji Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan model *fixed effect*, di uji chow dan uji hausman model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 4.14

Hasil Uji Model *Fixed Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.641586	0.445901	1.438855	0.1533
DP	-0.099990	0.017472	-5.722960	0.0000
UPD	0.062984	0.008904	7.073955	0.0000
BD	0.019892	0.008998	2.210721	0.0293
BM	-0.002740	0.004291	-0.638432	0.5247

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan tabel pengujian di atas dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{KKD = 0,641 - 0,099DP + 0,062UPD + 0,019BD - 0,002BM}$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (c) dalam model regresi ini sebesar 0,641. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen dalam penelitian ini bernilai 0, maka nilai kinerja keuangan daerah sebesar 0,641.

2. Nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan sebesar $-0,099$. Nilai ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 satuan dana perimbangan maka diikuti penurunan kinerja keuangan daerah sebesar $0,099$.
3. Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar $0,062$. Nilai ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 satuan ukuran pemerintah daerah maka diikuti peningkatan kinerja keuangan daerah sebesar $0,062$.
4. Nilai koefisien regresi variabel belanja daerah sebesar $0,019$. Nilai ini menunjukkan bahwa 1 satuan belanja daerah maka diikuti peningkatan kinerja keuangan daerah sebesar $0,019$.
5. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal sebesar $-0,002$. Nilai ini menunjukkan bahwa 1 satuan belanja modal maka diikuti penurunan kinerja keuangan daerah sebesar $0,002$.

4.2.7 Uji Hipotesis

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh individu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan signifikansi terdapat kriteria jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak yang artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima yang artinya ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15

Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.641586	0.445901	1.438855	0.1533
DP	-0.099990	0.017472	-5.722960	0.0000
UPD	0.062984	0.008904	7.073955	0.0000
BD	0.019892	0.008998	2.210721	0.0293
BM	-0.002740	0.004291	-0.638432	0.5247

Sumber: Output Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.15 dapat diketahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan

Hipotesis pertama (H1) adalah dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diketahui nilai *p-value* sebesar 0,0000 ($p < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi -0,099990 maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

2. Ukuran Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H2) adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diketahui nilai *p-value* sebesar 0,0000 ($p < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi 0,062984 maka dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

3. Belanja Daerah

Hipotesis ketiga (H3) adalah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diketahui nilai *p-value* sebesar 0,0293 ($p < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi 0,019892 maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H3) diterima.

4. Belanja Modal

Hipotesis keempat (H4) adalah belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diketahui nilai *p-value* sebesar 0,5247 ($p < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi -0,002740 maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis pengolahan data menunjukkan hasil bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dasar pengambilan keputusan ini dilihat dari besarnya nilai *probability t-statistics* $0,0000 < 0,05$ dan nilai *coefficient* menunjukkan arah negatif sebesar -0,0999990 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Analisis ini dapat dibuktikan dengan data bahwa nilai maksimum dari variabel dana perimbangan sebesar 28,29389 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 dengan nilai kinerja keuangan daerah 0,20 yang

artinya kinerja keuangan daerah di atas rata-rata, dapat dikatakan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah dalam menjalankan kinerja keuangannya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Andjarwati et al., 2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah menurun.

Hal ini terjadi karena masih banyak daerah yang masih bergantung sebagian besar keuangan daerahnya kepada pemerintah pusat. Dana perimbangan dikategorikan sebagai *block grant* yaitu kewenangan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah (Alfarisi, 2015).

Menurut teori agensi menjelaskan bahwa sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya.

Sehingga dengan meningkatkan pendapatan daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah (Sari & Aztisya, 2022).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armaja, (2015) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Andirfa, (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Alexander, (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil analisis pengolahan data menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dasar pengambilan keputusan ini dilihat dari besarnya nilai *probability t-statistics* $0,0000 < 0,05$ dan nilai *coefficient* menunjukkan arah positif sebesar 0,062984 sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Analisis ini dapat dibuktikan dengan data bahwa nilai maksimum dari variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 31,06407 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2018 dengan nilai kinerja keuangan daerah 0,43 yang artinya kinerja keuangan daerah di atas rata-rata, dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini sama dengan hasil penelitian dari Aulia & Rahmawaty, (2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Total aset yang dimiliki oleh suatu daerah dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional daerahnya untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah yaitu memudahkan kepada masyarakat untuk pembangunan jembatan, jalan dan transportasi umum. Total aset yang besar membuktikan bahwa kinerja keuangan yang dihasilkan sudah baik. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran pemerintah daerah maka, akan menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Total aset merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam penilaian terhadap kinerja keuangan (Garini, 2015). Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik.

Hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yaitu dengan jumlah aset yang lebih besar diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah aset yang lebih sedikit. Akan tetapi harus didukung oleh pemerintah (*agent*) yang mengelola aset daerah dengan sebaik-baiknya agar rencana yang disusun oleh suatu daerah dapat tercapai (Janah, 2019). Tercapainya tujuan pemerintah melalui kinerja yang dilakukan dalam mengelola aset dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Nugroho & Prasetyo, (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Imiyyah et al., (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Alvini, (2018) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.3 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Dari hasil analisis pengolahan data menunjukkan hasil bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dasar pengambilan keputusan ini dilihat dari besarnya nilai *probability t-statistics* $0,0293 < 0,05$ dan nilai *coefficient* menunjukkan arah positif sebesar 0,019892 sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima.

Analisis ini dapat dibuktikan dengan data bahwa nilai maksimum dari variabel belanja daerah sebesar 29,16443 yang dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2019 dengan nilai kinerja keuangan daerah 0,45 yang artinya kinerja keuangan daerah di atas rata-rata, dapat dikatakan bahwa semakin besar belanja daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjito et al., (2020) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besaran belanja daerah yang dikeluarkan dapat

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara teori, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, maka peningkatan kualitas kinerja keuangan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengalokasian belanja daerah maka semakin baik kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Secara umum belanja daerah bertujuan untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan pendekatan informasi (Halim, 2012). Hal ini ditunjukkan mulai dari pengakuan sampai proses pencatatan dan memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada sehingga pemerintah daerah dapat menghitung tingkat pengeluaran setiap bulannya,

Menurut teori agensi menjelaskan bahwa melalui pengalokasian belanja daerah yang memadai, kualitas kinerja keuangan dapat ditingkatkan sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya. Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan fungsi dalam pemerintahan harus bertanggungjawab dalam mengelola belanja daerah dengan baik (Janah, 2019). Apabila dari pemerintah daerah dapat bertanggungjawab dalam mengelola belanja daerah dengan baik, maka kinerja keuangan daerah dapat tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garini, (2015) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Aliamin et al., (2015) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah dan Wulandari, (2021) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Dari hasil analisis pengolahan data menunjukkan hasil bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dasar pengambilan keputusan ini dilihat dari besarnya nilai *probability t-statistics* $0,5247 > 0,05$ dan nilai *coefficient* menunjukkan arah negatif sebesar $-0,002740$ sehingga H_0 diterima dan H_4 ditolak.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Maulina et al., (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Selain itu belanja modal yang tinggi tidak mampu meningkatkan aset tetap sehingga menurunkan kinerja keuangan daerah.

Menurut teori agensi menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan fasilitas yang dibangun, sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga kinerja keuangan daerah menjadi lebih baik (Sari & Aztisya, 2022).

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam penelitian ini

belanja modal yang dialokasikan pemerintah belum mampu menarik motivasi publik untuk berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, realisasi belanja modal yang cenderung lambat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai daerah yang dikarenakan pengeluaran operasional pemerintah lebih dominan dibandingkan dengan belanja modal sehingga menyebabkan belanja modal belum bisa memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini yang menyebabkan belanja modal bukan sebagai penentu kinerja keuangan pemerintah daerah (Rambe, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Rohman, (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Darwanis & Saputra, (2014) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Kurniawati, (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Fernandes & Putri, (2022) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020. Dari pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020.
2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020.

Ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan total aset dikatakan rendah apabila $< 150M$, sedang $> 150M$ dan tinggi $> 500M$.

3. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020.

Belanja daerah dikatakan rendah apabila $< 30M$, sedang $> 30 M$ dan tinggi $> 100M$.

4. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020.

Belanja daerah dikatakan rendah apabila $< 30M$, sedang $> 30 M$ dan tinggi $> 100M$.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan dari penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan data dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Neraca dan Laporan Realisasi APBD.
2. Penelitian ini hanya menggunakan populasi selama 3 tahun dan hanya berfokus pada variabel dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah dan belanja modal.

5.3 Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya bisa memperluas objek penelitian seperti menggunakan objek penelitian seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih baik jangan terpaku dengan data yang bersumber dari data sekunder saja tetapi juga mengumpulkan data hingga meminta ke pemerintah Kabupaten/Kota terkait agar datanya lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2002). Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Abdullah, A., dan Febryansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*, 3(1), 45–46.
- Ahmad, M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2), 105–121.
- Aliamin, A., & Ridwan, I. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten/Kota Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168.
- Alvini, Y. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *JOM FEB*, 1(1), 1–15.
- Andjarwati T., Budiarti E., Soemadijo P.S., Yasin M. (2021). *Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province. International Journal Of Economics And Finance Studies*. 13(1), 235–250.
- Arief, I. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh. *Journal of Accounting and Research*, 8(2), 109–118.
- Asmaul, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *E-Jurnal Manajemen*, 11(1), 86–101.
- Aulia R., dan Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). 5(4), 584–598.

Cherrya, W. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2(1), 39–51.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10. Universitas Diponegoro.

Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.

Harjito, Y., Surya, G. P., & Yulianto, N. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonrsia. *Journal of Accounting and economics*, 5(1), 19–28.

Herman, S. dan Cahyo. (2016). *Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province*. *Journal of Economics and Business*, 5(2), 272–285.

Imiyyah, N, M., Evada. D. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147–162.

Joko, P. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Economics*, 7(13), 83–112.

Julitawati. E., Darwanis., dan Jalaludin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. *Journal of Accounting and Research*, 1(1), 15–29.

Kusumawardani. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–35.

Lian, A. M. dan Deby, D. E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Journal of Financial Economics*, 21(4), 81–94.

- Lutfiani, A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Marfiana, N. dan Lulus, K. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/K. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), 1–16.
- Marhawai. (2015). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 s.d 2014). *Journal of Accounting and Researchi*, 8(1), 49–58.
- Masdiantini, R. dan Erawati, N. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182.
- Matande, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economics and Business*, 5(1), 124-132.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, S. N. (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting, and Research*, 5(2), 390-399).
- Mulyani, S. dan Hardiyanto, W. (2012). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15(1), 57–66.
- Nugraheni, E. & Hari. A. P. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 20(1), 1942.
- Nugroho, T. R., & Novi, E. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa

Timur. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 27–34

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Rukmana, V. W. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-15.

Saputra, D. dan Ryanda. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.

Sari. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1), 679–692.

Sari, I. B., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1-11.

Sari, M., & Aztisya, A. (2022). *Determinants of Local Government Financial Performance. International Journal of Business Economics*, 4(1) 52–64.

Siregar, M. I. C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua. *Journal of Management*, 5(1), 26-42.

Soleh, C. dan Suropto. (2011). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *FOKUSMEDIA: Bandung*.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed methods). Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, L., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, 19(1) 21–37.

Wijayanti, S. E. dan Mutmainah, S. (2012). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Journal of Business, Finance, and Accounting*, 1(1), 1–14.

Wulandari, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 411–420.

www.djpk.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 2 : Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten dan Kota
1.	Kabupaten Banjarnegara
2.	Kabupaten Banyumas
3.	Kabupaten Batang
4.	Kabupaten Blora
5.	Kabupaten Boyolali
6.	Kabupaten Brebes
7.	Kabupaten Cilacap
8.	Kabupaten Demak
9.	Kabupaten Grobogan
10.	Kabupaten Jepara
11.	Kabupaten Karanganyar
12.	Kabupaten Kebumen
13.	Kabupaten Kendal
14.	Kabupaten Klaten
15.	Kabupaten Kudus
16.	Kabupaten Magelang
17.	Kabupaten Pati
18.	Kabupaten Pekalongan
19.	Kabupaten Pemasang
20.	Kabupaten Purbalingga
21.	Kabupaten Purworejo
22.	Kabupaten Rembang
23.	Kabupaten Semarang
24.	Kabupaten Sragen
25.	Kabupaten Sukoharjo
26.	Kabupaten Tegal
27.	Kabupaten Temanggung
28.	Kabupaten Wonogiri
29.	Kabupaten Wonosobo
30.	Kota Magelang
31.	Kota Pekalongan
32.	Kota Salatiga
33.	Kota Semarang
34.	Kota Surakarta
35.	Kota Tegal

Lampiran 3 : Data Mentah Penelitian Variabel Kinerja Keuangan Daerah

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	PAD	Total Pendapatan	KKD
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp235.994.436.137	Rp2.074.653.161.695	0,11
2.		2019	Rp257.700.650.110	Rp2.105.990.272.337	0,12
3.		2020	Rp238.638.994.321	Rp1.994.604.106.561	0,12
4.	Kab. Banyumas	2018	Rp648.326.914.035	Rp3.265.926.651.861	0,20
5.		2019	Rp686.805.512.326	Rp3.434.925.995.303	0,20
6.		2020	Rp668.211.148.299	Rp3.330.186.788.242	0,20
7.	Kab. Batang	2018	Rp237.547.973.048	Rp1.701.877.299.154	0,14
8.		2019	Rp245.836.087.092	Rp1.769.958.202.416	0,14
9.		2020	Rp257.422.866.095	Rp1.733.087.893.276	0,15
10.	Kab. Blora	2018	Rp203.182.795.054	Rp2.120.671.434.967	0,10
11.		2019	Rp246.863.066.484	Rp2.240.970.020.181	0,11
12.		2020	Rp299.687.660.301	Rp2.127.946.961.535	0,14
13.	Kab. Boyolali	2018	Rp342.957.213.726	Rp2.227.780.710.062	0,15
14.		2019	Rp395.431.863.402	Rp2.357.487.210.573	0,17
15.		2020	Rp451.543.582.894	Rp2.382.403.220.150	0,19
16.	Kab. Brebes	2018	Rp346.907.972.510	Rp2.854.043.939.110	0,12
17.		2019	Rp379.091.298.714	Rp3.096.826.845.150	0,12
18.		2020	Rp392.541.730.819	Rp3.008.370.717.507	0,13
19.	Kab. Cilacap	2018	Rp527.577.740.281	Rp3.072.112.464.787	0,17
20.		2019	Rp574.276.795.304	Rp3.282.797.966.311	0,17
21.		2020	Rp591.343.787.160	Rp3.152.402.455.712	0,19
22.	Kab. Demak	2018	Rp342.324.870.245	Rp2.143.306.258.595	0,16
23.		2019	Rp407.400.540.995	Rp2.362.016.248.793	0,17
24.		2020	Rp439.694.424.386	Rp2.333.738.996.799	0,19
25.	Kab. Grobogan	2018	Rp315.743.175.974	Rp2.439.501.262.356	0,13
26.		2019	Rp344.559.032.450	Rp2.581.437.543.584	0,13
27.		2020	Rp350.453.524.065	Rp2.528.884.131.946	0,14
28.	Kab. Jepara	2018	Rp369.330.454.700	Rp2.255.843.022.157	0,16
29.		2019	Rp384.979.296.768	Rp2.413.822.993.348	0,16
30.		2020	Rp419.363.320.517	Rp2.315.260.399.485	0,18
31.	Kab. Karanganyar	2018	Rp343.156.469.167	Rp2.113.929.231.663	0,16
32.		2019	Rp387.763.013.239	Rp2.179.409.706.710	0,18
33.		2020	Rp384.682.993.533	Rp2.121.386.179.225	0,18
34.	Kab. Kebumen	2018	Rp352.047.092.282	Rp 2.639.814.864.398	0,13
35.		2019	Rp409.163.433.330	Rp2.818.494.983.541	0,15
36.		2020	Rp403.025.963.784	Rp2.763.229.307.230	0,15
37.	Kab. Kendal	2018	Rp335.892.237.024	Rp2.138.564.387.700	0,16
38.		2019	Rp350.500.849.956	Rp2.228.384.399.855	0,16
39.		2020	Rp356.753.593.703	Rp2.131.449.784.048	0,17
40.	Kab. Klaten	2018	Rp395.884.244.135	Rp2.577.961.130.135	0,15
41.		2019	Rp311.648.401.655	Rp2.689.353.252.985	0,12
42.		2020	Rp329.963.261.898	Rp2.578.135.836.354	0,13
43.	Kab. Kudus	2018	Rp337.364.609.424	Rp1.996.530.094.357	0,17
44.		2019	Rp343.824.122.868	Rp2.090.430.364.413	0,16
45.		2020	Rp383.892.971.961	Rp2.016.176.986.239	0,19
46.	Kab. Magelang	2018	Rp325.089.093.092	Rp2.302.190.543.616	0,14
47.		2019	Rp417.178.099.961	Rp2.575.439.825.755	0,16
48.		2020	Rp329.769.193.224	Rp2.380.457.680.604	0,14
49.	Kab. Pati	2018	Rp384.041.846.939	Rp2.789.055.859.854	0,14

50.		2019	Rp363.997.151.178	Rp2.838.881.396.181	0,13
51.		2020	Rp371.708.005.192	Rp2.662.375.437.006	0,14
52.	Kab. Pekalongan	2018	Rp311.288.143.682	Rp2.101.449.302.497	0,15
53.		2019	Rp341.344.415.575	Rp2.182.770.952.456	0,16
54.		2020	Rp341.901.469.549	Rp2.061.798.474.096	0,17
55.	Kab. Pemalang	2018	Rp300.481.887.079	Rp2.428.263.885.703	0,12
56.		2019	Rp350.559.139.753	Rp2.636.036.843.851	0,13
57.		2020	Rp328.375.466.698	Rp2.449.008.577.285	0,13
58.	Kab. Purbalingga	2018	Rp282.679.019.517	Rp1.948.442.029.100	0,15
59.		2019	Rp305.996.806.188	Rp2.076.658.114.142	0,15
60.		2020	Rp313.618.688.781	Rp1.952.749.301.274	0,16
61.	Kab. Purworejo	2018	Rp286.971.590.024	Rp2.049.784.186.054	0,14
62.		2019	Rp280.396.155.600	Rp2.172.436.925.114	0,13
63.		2020	Rp304.800.202.905	Rp2.166.947.747.648	0,14
64.	Kab. Rembang	2018	Rp296.676.436.263	Rp1.785.911.075.230	0,17
65.		2019	Rp308.445.489.137	Rp1.821.899.884.311	0,17
66.		2020	Rp326.670.124.351	Rp1.878.325.919.916	0,17
67.	Kab. Semarang	2018	Rp383.475.678.134	Rp2.117.416.566.804	0,18
68.		2019	Rp429.011.081.257	Rp2.311.149.343.922	0,19
69.		2020	Rp442.528.167.478	Rp2.211.273.524.266	0,20
70.	Kab. Sragen	2018	Rp334.303.284.344	Rp2.176.997.511.640	0,15
71.		2019	Rp368.325.799.601	Rp2.300.826.069.513	0,16
72.		2020	Rp394.464.906.604	Rp2.212.824.974.529	0,18
73.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp433.485.481.219	Rp2.055.517.964.074	0,21
74.		2019	Rp458.742.223.869	Rp2.143.687.569.516	0,21
75.		2020	Rp469.540.567.890	Rp2.040.394.761.328	0,23
76.	Kab. Tegal	2018	Rp372.282.676.055	Rp2.524.365.919.815	0,15
77.		2019	Rp436.003.392.413	Rp2.755.677.484.152	0,16
78.		2020	Rp439.931.567.175	Rp2.651.771.838.698	0,17
79.	Kab. Temanggung	2018	Rp252.019.934.778	Rp1.731.235.867.161	0,15
80.		2019	Rp278.313.775.793	Rp1.878.383.823.682	0,15
81.		2020	Rp307.488.084.365	Rp1.830.848.453.347	0,17
82.	Kab. Wonogiri	2018	Rp269.032.427.619	Rp2.298.176.600.990	0,12
83.		2019	Rp287.221.631.013	Rp2.442.677.972.827	0,12
84.		2020	Rp274.293.129.950	Rp2.273.678.538.635	0,12
85.	Kab. Wonosobo	2018	Rp226.819.478.601	Rp1.851.441.024.405	0,12
86.		2019	Rp238.371.743.591	Rp1.958.595.025.572	0,12
87.		2020	Rp251.724.091.045	Rp1.878.995.666.418	0,13
88.	Kota Magelang	2018	Rp249.877.424.347	Rp908.089.485.909	0,28
89.		2019	Rp273.582.932.151	Rp967.785.834.243	0,28
90.		2020	Rp290.756.816.510	Rp946.188.761.537	0,31
91.	Kota Pekalongan	2018	Rp179.224.408.698	Rp905.231.572.568	0,20
92.		2019	Rp212.777.435.294	Rp971.624.464.121	0,22
93.		2020	Rp229.867.935.361	Rp953.155.394.615	0,24
94.	Kota Salatiga	2018	Rp208.926.057.032	Rp889.992.411.250	0,23
95.		2019	Rp236.086.898.372	Rp928.019.899.150	0,25
96.		2020	Rp219.539.400.332	Rp890.223.683.933	0,25
97.	Kota Semarang	2018	Rp1.821.274.103.250	Rp4.234.394.060.362	0,43
99.		2019	Rp2.066.333.418.588	Rp4.565.340.827.417	0,45
99.		2020	Rp2.024.537.808.307	Rp4.400.500.838.480	0,46
100.	Kota Surakarta	2018	Rp527.739.388.159	Rp1.879.056.016.679	0,28
101.		2019	Rp546.020.008.117	Rp1.945.953.241.924	0,28
102.		2020	Rp492.776.208.640	Rp1.831.319.373.387	0,27

103.	Kota Tegal	2018	Rp275.021.448.594	Rp987.244.236.619	0,28
104.		2019	Rp285.575.788.984	Rp1.036.963.763.529	0,28
105.		2020	Rp266.580.982.102	Rp1.017.915.109.373	0,26

Lampiran 4 : Data Mentah Penelitian Variabel Dana Perimbangan

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Dana Perimbangan	LN (Dana Perimbangan)
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp1.354.080.374.738	27,93
2.		2019	Rp1.345.282.274.537	27,93
3.		2020	Rp1.238.071.740.603	27,84
4.	Kab. Banyumas	2018	Rp1.894.413.016.142	28,27
5.		2019	Rp1.940.352.355.633	28,29
6.		2020	Rp1.854.294.495.150	28,25
7.	Kab. Batang	2018	Rp1.048.707.118.663	27,68
8.		2019	Rp1.090.972.263.503	27,72
9.		2020	Rp1.008.861.912.901	27,64
10.	Kab. Blora	2018	Rp1.375.550.409.408	27,95
11.		2019	Rp1.441.716.460.262	28,00
12.		2020	Rp1.259.239.750.269	27,86
13.	Kab. Boyolali	2018	Rp1.438.528.619.300	27,99
14.		2019	Rp1.436.635.314.225	27,99
15.		2020	Rp1.356.374.607.571	27,94
16.	Kab. Brebes	2018	Rp1.753.057.931.104	28,19
17.		2019	Rp1.876.097.637.787	28,26
18.		2020	Rp1.708.279.450.821	28,17
19.	Kab. Cilacap	2018	Rp1.874.260.346.332	28,26
20.		2019	Rp1.928.670.863.364	28,29
21.		2020	Rp1.757.591.202.654	28,19
22.	Kab. Demak	2018	Rp1.205.186.810.394	27,82
23.		2019	Rp1.274.017.335.391	27,87
24.		2020	Rp1.181.046.800.246	27,80
25.	Kab. Grobogan	2018	Rp1.520.822.495.760	28,05
26.		2019	Rp1.563.813.913.035	28,08
27.		2020	Rp1.444.279.746.734	28,00
28.	Kab. Jepara	2018	Rp1.339.634.292.620	27,92
29.		2019	Rp1.393.154.748.566	27,96
30.		2020	Rp1.280.105.479.190	27,88
31.	Kab. Karanganyar	2018	Rp1.325.732.297.703	27,91
32.		2019	Rp1.358.762.557.968	27,94
33.		2020	Rp1.247.805.559.571	27,85
34.	Kab. Kebumen	2018	Rp1.654.135.303.906	28,13
35.		2019	Rp1.688.387.155.843	28,15
36.		2020	Rp1.624.225.405.094	28,12
37.	Kab. Kendal	2018	Rp1.299.802.798.970	27,89
38.		2019	Rp1.348.372.347.984	27,93
39.		2020	Rp1.228.541.096.335	27,84
40.	Kab. Klaten	2018	Rp1.652.127.767.661	28,13
41.		2019	Rp1.666.073.637.378	28,14
42.		2020	Rp1.516.494.102.076	28,05
43.	Kab. Kudus	2018	Rp1.281.771.374.568	27,88
44.		2019	Rp1.298.060.004.624	27,89
45.		2020	Rp1.183.590.147.772	27,80
46.	Kab. Magelang	2018	Rp1.398.132.841.570	27,97
47.		2019	Rp1.452.804.059.102	28,00
48.		2020	Rp1.331.514.071.778	27,92
49.	Kab. Pati	2018	Rp1.637.310.968.390	28,12

50.		2019	Rp1.637.460.890.857	28,12
51.		2020	Rp1.505.063.848.568	28,04
52.	Kab. Pekalongan	2018	Rp1.288.217.218.488	27,88
53.		2019	Rp1.321.954.447.227	27,91
54.		2020	Rp1.206.915.407.953	27,82
55.	Kab. Pemalang	2018	Rp1.542.918.673.569	28,06
56.		2019	Rp1.598.475.375.026	28,10
57.		2020	Rp1.478.357.232.531	28,02
58.	Kab. Purbalingga	2018	Rp1.240.574.231.875	27,85
59.		2019	Rp1.271.720.206.430	27,87
60.		2020	Rp1.144.405.027.431	27,77
61.	Kab. Purworejo	2018	Rp1.247.436.685.096	27,85
62.		2019	Rp1.292.431.347.427	27,89
63.		2020	Rp1.225.319.536.635	27,83
64.	Kab. Rembang	2018	Rp902.171.379.111	27,53
65.		2019	Rp1.051.964.945.792	27,68
66.		2020	Rp1.012.352.994.244	27,64
67.	Kab. Semarang	2018	Rp1.307.508.472.787	27,90
68.		2019	Rp1.351.090.467.972	27,93
69.		2020	Rp1.240.480.579.637	27,85
70.	Kab. Sragen	2018	Rp1.396.508.762.647	27,96
71.		2019	Rp1.431.291.179.984	27,99
72.		2020	Rp1.351.654.579.917	27,93
73.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp1.219.811.099.454	27,83
74.		2019	Rp1.248.563.458.768	27,85
75.		2020	Rp1.163.627.289.398	27,78
76.	Kab. Tegal	2018	Rp1.513.203.330.274	28,05
77.		2019	Rp1.586.668.848.339	28,09
78.		2020	Rp1.477.714.812.445	28,02
79.	Kab. Temanggung	2018	Rp1.069.110.356.426	27,70
80.		2019	Rp1.133.246.263.266	27,76
81.		2020	Rp1.046.567.778.773	27,68
82.	Kab. Wonogiri	2018	Rp1.532.139.685.475	28,06
83.		2019	Rp1.594.457.129.912	28,10
84.		2020	Rp1.451.651.540.186	28,00
85.	Kab. Wonosobo	2018	Rp1.139.805.205.659	27,76
86.		2019	Rp1.236.562.229.419	27,84
87.		2020	Rp1.123.108.003.017	27,75
88.	Kota Magelang	2018	Rp570.455.641.253	27,07
89.		2019	Rp574.099.278.956	27,08
90.		2020	Rp525.575.219.057	26,99
91.	Kota Pekalongan	2018	Rp586.379.794.858	27,10
92.		2019	Rp610.332.820.948	27,14
93.		2020	Rp567.310.188.409	27,06
94.	Kota Salatiga	2018	Rp561.012.927.696	27,05
95.		2019	Rp569.354.886.045	27,07
96.		2020	Rp522.042.585.441	26,98
97.	Kota Semarang	2018	Rp1.438.790.841.076	27,99
99.		2019	Rp1.738.443.043.620	28,18
99.		2020	Rp1.669.101.931.826	28,14
100.	Kota Surakarta	2018	Rp1.090.922.293.666	27,72
101.		2019	Rp1.110.329.047.182	27,74
102.		2020	Rp1.045.123.446.172	27,68

103.	Kota Tegal	2018	Rp602.567.259.369	27,12
104.		2019	Rp641.682.768.016	27,19
105.		2020	Rp623.096.507.712	27,16

Lampiran 5 : Data Mentah Penelitian Variabel Ukuran Pemerintah Daerah

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Total Aset	LN (Total Aset)
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp4.355.751.220.425	29,10
2.		2019	Rp4.469.370.847.873	29,13
3.		2020	Rp4.528.919.724.976	29,14
4.	Kab. Banyumas	2018	Rp6.419.865.052.453	29,49
5.		2019	Rp6.226.652.415.512	29,46
6.		2020	Rp6.540.515.839.033	29,51
7.	Kab. Batang	2018	Rp2.511.746.350.765	28,55
8.		2019	Rp2.664.373.528.271	28,61
9.		2020	Rp2.909.762.489.945	28,70
10.	Kab. Bora	2018	Rp2.916.854.233.298	28,70
11.		2019	Rp3.362.562.896.873	28,84
12.		2020	Rp3.382.901.824.153	28,85
13.	Kab. Boyolali	2018	Rp3.116.090.963.844	28,77
14.		2019	Rp3.770.144.077.202	28,96
15.		2020	Rp4.227.690.989.735	29,07
16.	Kab. Brebes	2018	Rp3.366.883.430.103	28,85
17.		2019	Rp4.187.462.596.274	29,06
18.		2020	Rp3.740.761.434.712	28,95
19.	Kab. Cilacap	2018	Rp4.590.474.285.434	29,16
20.		2019	Rp5.735.055.789.650	29,38
21.		2020	Rp6.047.267.120.680	29,43
22.	Kab. Demak	2018	Rp5.084.647.496.851	29,26
23.		2019	Rp5.450.473.201.190	29,33
24.		2020	Rp5.697.120.718.057	29,37
25.	Kab. Grobogan	2018	Rp3.504.789.426.758	28,89
26.		2019	Rp3.642.816.444.594	28,92
27.		2020	Rp3.771.022.502.289	28,96
28.	Kab. Jepara	2018	Rp6.132.256.105.267	29,44
29.		2019	Rp6.496.679.937.377	29,50
30.		2020	Rp6.626.878.048.525	29,52
31.	Kab. Karanganyar	2018	Rp3.190.931.038.152	28,79
32.		2019	Rp3.476.942.970.374	28,88
33.		2020	Rp4.422.303.404.842	29,12
34.	Kab. Kebumen	2018	Rp4.548.688.282.913	29,15
35.		2019	Rp4.482.323.838.554	29,13
36.		2020	Rp4.525.738.172.682	29,14
37.	Kab. Kendal	2018	Rp3.081.268.497.841	28,76
38.		2019	Rp3.026.908.855.357	28,74
39.		2020	Rp3.130.779.619.645	28,77
40.	Kab. Klaten	2018	Rp4.001.324.130.418	29,02
41.		2019	Rp4.157.398.988.909	29,06
42.		2020	Rp3.566.777.871.038	28,90
43.	Kab. Kudus	2018	Rp4.159.213.413.942	29,06
44.		2019	Rp4.468.531.280.044	29,13
45.		2020	Rp4.670.496.301.415	29,17
46.	Kab. Magelang	2018	Rp3.141.760.777.818	28,78
47.		2019	Rp3.270.629.440.572	28,82
48.		2020	Rp3.429.577.837.888	28,86
49.	Kab. Pati	2018	Rp6.190.923.149.283	29,45

50.		2019	Rp6.439.754.615.979	29,49
51.		2020	Rp6.254.897.635.666	29,46
52.	Kab. Pekalongan	2018	Rp2.763.481.985.690	28,65
53.		2019	Rp3.020.680.906.817	28,74
54.		2020	Rp3.066.064.901.783	28,75
55.	Kab. Pemalang	2018	Rp3.512.512.785.581	28,89
56.		2019	Rp3.786.927.056.410	28,96
57.		2020	Rp3.803.001.551.340	28,97
58.	Kab. Purbalingga	2018	Rp2.621.915.743.198	28,59
59.		2019	Rp2.846.328.687.092	28,68
60.		2020	Rp2.769.994.111.890	28,65
61.	Kab. Purworejo	2018	Rp2.772.960.299.931	28,65
62.		2019	Rp2.987.231.520.048	28,73
63.		2020	Rp3.108.457.930.733	28,77
64.	Kab. Rembang	2018	Rp2.083.375.254.651	28,37
65.		2019	Rp2.143.033.080.689	28,39
66.		2020	Rp2.346.462.043.811	28,48
67.	Kab. Semarang	2018	Rp4.381.254.462.290	29,11
68.		2019	Rp4.689.787.427.166	29,18
69.		2020	Rp4.902.581.178.648	29,22
70.	Kab. Sragen	2018	Rp3.374.697.292.758	28,85
71.		2019	Rp3.941.848.384.832	29,00
72.		2020	Rp4.087.577.565.236	29,04
73.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp4.738.164.776.817	29,19
74.		2019	Rp5.194.655.435.894	29,28
75.		2020	Rp5.674.969.987.939	29,37
76.	Kab. Tegal	2018	Rp3.184.190.479.588	28,79
77.		2019	Rp3.377.567.475.084	28,85
78.		2020	Rp3.604.540.958.067	28,91
79.	Kab. Temanggung	2018	Rp3.104.748.410.142	28,76
80.		2019	Rp3.240.096.678.946	28,81
81.		2020	Rp3.185.950.678.297	28,79
82.	Kab. Wonogiri	2018	Rp3.441.897.165.791	28,87
83.		2019	Rp3.740.376.254.031	28,95
84.		2020	Rp3.821.069.295.194	28,97
85.	Kab. Wonosobo	2018	Rp3.070.057.342.570	28,75
86.		2019	Rp3.390.531.356.578	28,85
87.		2020	Rp3.441.342.186.114	28,87
88.	Kota Magelang	2018	Rp3.865.401.096.564	28,98
89.		2019	Rp4.012.816.686.651	29,02
90.		2020	Rp4.160.262.610.517	29,06
91.	Kota Pekalongan	2018	Rp2.463.049.418.792	28,53
92.		2019	Rp2.856.674.222.675	28,68
93.		2020	Rp2.921.917.451.388	28,70
94.	Kota Salatiga	2018	Rp3.112.709.787.205	28,77
95.		2019	Rp3.072.155.684.616	28,75
96.		2020	Rp3.122.413.367.016	28,77
97.	Kota Semarang	2018	Rp30.970.860.367.210	31,06
99.		2019	Rp18.159.413.566.476	30,53
99.		2020	Rp21.003.912.081.270	30,68
100.	Kota Surakarta	2018	Rp7.733.569.021.424	29,68
101.		2019	Rp11.719.105.713.695	30,09
102.		2020	Rp12.135.931.598.222	30,13

103.	Kota Tegal	2018	Rp2.402.980.382.890	28,51
104.		2019	Rp2.417.612.856.682	28,51
105.		2020	Rp2.396.957.279.062	28,51

Lampiran 6 : Data Mentah Penelitian Variabel Belanja Daerah

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Belanja Daerah	LN (Belanja Daerah)
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp2.119.096.683.202	28,38
2.		2019	Rp2.123.033.797.431	28,38
3.		2020	Rp2.030.532.397.495	28,34
4.	Kab. Banyumas	2018	Rp3.319.060.759.043	28,83
5.		2019	Rp3.457.550.201.497	28,87
6.		2020	Rp3.249.141.935.364	28,81
7.	Kab. Batang	2018	Rp1.687.215.725.890	28,15
8.		2019	Rp1.755.066.560.019	28,19
9.		2020	Rp1.662.512.932.221	28,14
10.	Kab. Bora	2018	Rp2.116.475.561.459	28,38
11.		2019	Rp2.201.539.935.903	28,42
12.		2020	Rp1.662.512.932.221	28,14
13.	Kab. Boyolali	2018	Rp2.203.112.762.252	28,42
14.		2019	Rp2.381.601.864.739	28,50
15.		2020	Rp2.109.122.887.754	28,38
16.	Kab. Brebes	2018	Rp2.825.364.002.156	28,67
17.		2019	Rp3.132.251.740.580	28,77
18.		2020	Rp2.339.805.517.025	28,48
19.	Kab. Cilacap	2018	Rp2.985.422.839.102	28,72
20.		2019	Rp3.283.321.137.886	28,82
21.		2020	Rp2.955.050.373.005	28,71
22.	Kab. Demak	2018	Rp2.050.065.954.050	28,35
23.		2019	Rp2.309.815.550.608	28,47
24.		2020	Rp3.088.834.820.260	28,76
25.	Kab. Grobogan	2018	Rp2.345.537.047.244	28,48
26.		2019	Rp2.551.226.710.394	28,57
27.		2020	Rp2.285.742.096.591	28,46
28.	Kab. Jepara	2018	Rp2.300.574.121.504	28,46
29.		2019	Rp2.337.605.986.009	28,48
30.		2020	Rp2.511.268.625.929	28,55
31.	Kab. Karanganyar	2018	Rp2.064.581.557.575	28,36
32.		2019	Rp2.262.015.969.098	28,45
33.		2020	Rp2.268.045.725.410	28,45
34.	Kab. Kebumen	2018	Rp2.652.047.980.376	28,61
35.		2019	Rp2.809.549.444.627	28,66
36.		2020	Rp2.092.032.552.152	28,37
37.	Kab. Kendal	2018	Rp2.148.450.040.419	28,40
38.		2019	Rp2.331.683.034.136	28,48
39.		2020	Rp2.737.861.916.080	28,64
40.	Kab. Klaten	2018	Rp2.611.007.499.826	28,59
41.		2019	Rp2.682.356.733.814	28,62
42.		2020	Rp2.041.114.766.533	28,34
43.	Kab. Kudus	2018	Rp1.957.701.652.495	28,30
44.		2019	Rp2.061.664.156.540	28,35
45.		2020	Rp2.545.164.494.577	28,57
46.	Kab. Magelang	2018	Rp2.486.540.561.169	28,54
47.		2019	Rp2.568.593.603.007	28,57
48.		2020	Rp1.914.626.257.581	28,28
49.	Kab. Pati	2018	Rp2.781.234.687.644	28,65

50.		2019	Rp2.870.260.403.230	28,69
51.		2020	Rp2.304.375.917.161	28,47
52.	Kab. Pekalongan	2018	Rp2.160.744.430.323	28,40
53.		2019	Rp2.183.534.790.005	28,41
54.		2020	Rp2.739.724.372.740	28,64
55.	Kab. Pemalang	2018	Rp2.324.288.798.012	28,47
56.		2019	Rp2.584.470.869.519	28,58
57.		2020	Rp2.053.017.711.594	28,35
58.	Kab. Purbalingga	2018	Rp1.924.908.432.550	28,29
59.		2019	Rp2.062.727.850.424	28,36
60.		2020	Rp2.664.990.530.908	28,61
61.	Kab. Purworejo	2018	Rp2.125.880.839.764	28,39
62.		2019	Rp2.186.289.226.260	28,41
63.		2020	Rp1.894.875.529.380	28,27
64.	Kab. Rembang	2018	Rp1.814.662.262.214	28,23
65.		2019	Rp1.863.502.828.110	28,25
66.		2020	Rp2.126.674.178.307	28,39
67.	Kab. Semarang	2018	Rp2.171.799.810.994	28,41
68.		2019	Rp2.312.242.117.310	28,47
69.		2020	Rp1.830.776.504.959	28,24
70.	Kab. Sragen	2018	Rp2.236.802.757.132	28,44
71.		2019	Rp2.092.140.283.903	28,37
72.		2020	Rp2.191.412.621.750	28,42
73.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp2.050.161.904.519	28,35
74.		2019	Rp2.114.149.361.513	28,38
75.		2020	Rp2.130.438.476.217	28,39
76.	Kab. Tegal	2018	Rp2.575.620.503.042	28,58
77.		2019	Rp2.717.431.598.854	28,63
78.		2020	Rp2.073.080.966.909	28,36
79.	Kab. Temanggung	2018	Rp1.670.309.285.608	28,14
80.		2019	Rp1.841.033.635.270	28,24
81.		2020	Rp2.505.539.949.420	28,55
82.	Kab. Wonogiri	2018	Rp2.246.861.248.844	28,44
83.		2019	Rp2.455.975.319.573	28,53
84.		2020	Rp1.783.204.949.098	28,21
85.	Kab. Wonosobo	2018	Rp1.856.165.286.054	28,25
86.		2019	Rp2.024.794.957.930	28,34
87.		2020	Rp2.262.812.452.301	28,45
88.	Kota Magelang	2018	Rp937.345.746.470	27,57
89.		2019	Rp995.162.119.612	27,63
90.		2020	Rp1.881.315.428.762	28,26
91.	Kota Pekalongan	2018	Rp883.184.894.707	27,51
92.		2019	Rp954.397.012.827	27,58
93.		2020	Rp798.353.191.714	27,41
94.	Kota Salatiga	2018	Rp923.538.238.485	27,55
95.		2019	Rp942.687.426.593	27,57
96.		2020	Rp944.840.460.676	27,57
97.	Kota Semarang	2018	Rp4.506.407.629.744	29,14
99.		2019	Rp4.633.934.340.973	29,16
99.		2020	Rp4.128.912.545.760	29,05
100.	Kota Surakarta	2018	Rp1.914.818.394.396	28,28
101.		2019	Rp2.012.408.112.863	28,33
102.		2020	Rp1.639.665.226.421	28,13

103.	Kota Tegal	2018	Rp916.730.788.800	27,54
104.		2019	Rp1.046.575.212.898	27,68
105.		2020	Rp1.048.606.495.383	27,68

Lampiran 7 : Data Mentah Penelitian Variabel Belanja Modal

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Belanja Modal	LN (Belanja Modal)
1.	Kab. Banjarnegara	2018	Rp474.607.689.278	26,89
2.		2019	Rp358.205.528.802	26,60
3.		2020	Rp348.505.249.709	26,58
4.	Kab. Banyumas	2018	Rp525.416.939.614	26,99
5.		2019	Rp478.797.497.271	26,89
6.		2020	Rp363.470.409.584	26,62
7.	Kab. Batang	2018	Rp163.400.979.708	25,82
8.		2019	Rp211.778.239.648	26,08
9.		2020	Rp152.870.895.295	25,75
10.	Kab. Blora	2018	Rp499.439.779.133	26,94
11.		2019	Rp466.887.346.008	26,87
12.		2020	Rp349.064.685.820	26,58
13.	Kab. Boyolali	2018	Rp498.972.083.904	26,94
14.		2019	Rp530.593.843.520	27,00
15.		2020	Rp405.110.958.145	26,73
16.	Kab. Brebes	2018	Rp527.158.454.521	26,99
17.		2019	Rp621.919.531.365	27,16
18.		2020	Rp432.556.254.864	26,79
19.	Kab. Cilacap	2018	Rp550.840.750.506	27,03
20.		2019	Rp663.321.198.006	27,22
21.		2020	Rp462.431.933.784	26,86
22.	Kab. Demak	2018	Rp414.681.322.203	26,75
23.		2019	Rp455.482.429.713	26,84
24.		2020	Rp286.913.547.351	26,38
25.	Kab. Grobogan	2018	Rp423.425.389.079	26,77
26.		2019	Rp448.666.101.416	26,83
27.		2020	Rp338.711.253.077	26,55
28.	Kab. Jepara	2018	Rp397.783.041.502	26,71
29.		2019	Rp325.214.472.023	26,51
30.		2020	Rp266.275.554.085	26,31
31.	Kab. Karanganyar	2018	Rp261.936.024.361	26,29
32.		2019	Rp286.884.774.876	26,38
33.		2020	Rp148.559.342.370	25,72
34.	Kab. Kebumen	2018	Rp370.004.376.524	26,64
35.		2019	Rp365.840.794.028	26,63
36.		2020	Rp288.801.049.018	26,39
37.	Kab. Kendal	2018	Rp284.991.421.170	26,38
38.		2019	Rp283.503.675.627	26,37
39.		2020	Rp108.455.011.780	25,41
40.	Kab. Klaten	2018	Rp384.574.980.960	26,68
41.		2019	Rp308.145.403.976	26,45
42.		2020	Rp157.126.719.574	25,78
43.	Kab. Kudus	2018	Rp377.578.292.200	26,66
44.		2019	Rp278.210.578.665	26,35
45.		2020	Rp221.806.162.432	26,13
46.	Kab. Magelang	2018	Rp501.727.375.261	26,94
47.		2019	Rp386.529.995.844	26,68
48.		2020	Rp214.407.058.402	26,09
49.	Kab. Pati	2018	Rp439.492.642.225	26,81

50.		2019	Rp405.100.296.549	26,73
51.		2020	Rp315.613.926.745	26,48
52.	Kab. Pekalongan	2018	Rp431.412.970.525	26,79
53.		2019	Rp345.165.297.652	26,57
54.		2020	Rp241.237.735.400	26,21
55.	Kab. Pemalang	2018	Rp291.381.937.258	26,40
56.		2019	Rp347.657.852.647	26,57
57.		2020	Rp342.593.987.691	26,56
58.	Kab. Purbalingga	2018	Rp270.527.629.406	26,32
59.		2019	Rp262.136.781.292	26,29
60.		2020	Rp130.334.116.841	25,59
61.	Kab. Purworejo	2018	Rp365.866.406.531	26,63
62.		2019	Rp327.413.701.414	26,51
63.		2020	Rp254.015.009.152	26,26
64.	Kab. Rembang	2018	Rp309.448.505.895	26,46
65.		2019	Rp207.071.429.379	26,06
66.		2020	Rp154.123.440.858	25,76
67.	Kab. Semarang	2018	Rp405.051.441.667	26,73
68.		2019	Rp393.472.095.964	26,70
69.		2020	Rp219.069.909.089	26,11
70.	Kab. Sragen	2018	Rp428.218.853.657	26,78
71.		2019	Rp249.326.386.054	26,24
72.		2020	Rp268.507.459.807	26,32
73.	Kab. Sukoharjo	2018	Rp388.468.318.338	26,69
74.		2019	Rp350.577.750.659	26,58
75.		2020	Rp238.738.380.776	26,20
76.	Kab. Tegal	2018	Rp417.983.021.935	26,76
77.		2019	Rp434.393.482.658	26,80
78.		2020	Rp248.977.818.850	26,24
79.	Kab. Temanggung	2018	Rp185.771.793.520	25,95
80.		2019	Rp223.249.187.567	26,13
81.		2020	Rp102.083.054.523	25,35
82.	Kab. Wonogiri	2018	Rp406.899.652.093	26,73
83.		2019	Rp565.091.976.631	27,06
84.		2020	Rp291.314.088.408	26,40
85.	Kab. Wonosobo	2018	Rp381.600.659.789	26,67
86.		2019	Rp430.765.650.280	26,79
87.		2020	Rp243.001.724.523	26,22
88.	Kota Magelang	2018	Rp237.422.914.193	26,19
89.		2019	Rp272.055.204.204	26,33
90.		2020	Rp116.558.397.390	25,48
91.	Kota Pekalongan	2018	Rp146.382.593.476	25,71
92.		2019	Rp182.153.984.579	25,93
93.		2020	Rp126.926.093.953	25,57
94.	Kota Salatiga	2018	Rp222.021.981.988	26,13
95.		2019	Rp183.724.641.420	25,94
96.		2020	Rp174.131.330.590	25,88
97.	Kota Semarang	2018	Rp1.228.459.434.270	27,84
99.		2019	Rp1.054.761.429.772	27,68
99.		2020	Rp506.420.330.795	26,95
100.	Kota Surakarta	2018	Rp523.770.318.153	26,98
101.		2019	Rp543.578.176.920	27,02
102.		2020	Rp250.969.805.187	26,25

103.	Kota Tegal	2018	Rp113.622.507.976	25,46
104.		2019	Rp165.982.915.065	25,84
105.		2020	Rp148.142.669.908	25,72

Lampiran 8 : Variabel Independen dan Variabel Dependen

No	Kabupaten dan Kota	Tahun	Dana Perimbangan (X1)	Ukuran Pemerintah Daerah (X2)	Belanja Dearah (X3)	Belanja Modal (X3)	KKD (Y)
1.	Kab. Banjarnegara	2018	27,93	29,10	28,38	26,89	0,11
2.		2019	27,93	29,13	28,38	26,60	0,12
3.		2020	27,84	29,14	28,34	26,58	0,12
4.	Kab. Banyumas	2018	28,27	29,49	28,83	26,99	0,20
5.		2019	28,29	29,46	28,87	26,89	0,20
6.		2020	28,25	29,51	28,81	26,62	0,20
7.	Kab. Batang	2018	27,68	28,55	28,15	25,82	0,14
8.		2019	27,72	28,61	28,19	26,08	0,14
9.		2020	27,64	28,70	28,14	25,75	0,15
10.	Kab. Blora	2018	27,95	28,70	28,38	26,94	0,10
11.		2019	28,00	28,84	28,42	26,87	0,11
12.		2020	27,86	28,85	28,14	26,58	0,14
13.	Kab. Boyolali	2018	27,99	28,77	28,42	26,94	0,15
14.		2019	27,99	28,96	28,50	27,00	0,17
15.		2020	27,94	29,07	28,38	26,73	0,19
16.	Kab. Brebes	2018	28,19	28,85	28,67	26,99	0,12
17.		2019	28,26	29,06	28,77	27,16	0,12
18.		2020	28,17	28,95	28,48	26,79	0,13
19.	Kab. Cilacap	2018	28,26	29,16	28,72	27,03	0,17
20.		2019	28,29	29,38	28,82	27,22	0,17
21.		2020	28,19	29,43	28,71	26,86	0,19
22.	Kab. Demak	2018	27,82	29,26	28,35	26,75	0,16
23.		2019	27,87	29,33	28,47	26,84	0,17
24.		2020	27,80	29,37	28,76	26,38	0,19
25.	Kab. Grobogan	2018	28,05	28,89	28,48	26,77	0,13
26.		2019	28,08	28,92	28,57	26,83	0,13
27.		2020	28,00	28,96	28,46	26,55	0,14
28.	Kab. Jepara	2018	27,92	29,44	28,46	26,71	0,16
29.		2019	27,96	29,50	28,48	26,51	0,16
30.		2020	27,88	29,52	28,55	26,31	0,18
31.	Kab. Karanganyar	2018	27,91	28,79	28,36	26,29	0,16
32.		2019	27,94	28,88	28,45	26,38	0,18
33.		2020	27,85	29,12	28,45	25,72	0,18
34.	Kab. Kebumen	2018	28,13	29,15	28,61	26,64	0,13
35.		2019	28,15	29,13	28,66	26,63	0,15
36.		2020	28,12	29,14	28,37	26,39	0,15
37.	Kab. Kendal	2018	27,89	28,76	28,40	26,38	0,16
38.		2019	27,93	28,74	28,48	26,37	0,16
39.		2020	27,84	28,77	28,64	25,41	0,17
40.	Kab. Klaten	2018	28,13	29,02	28,59	26,68	0,15
41.		2019	28,14	29,06	28,62	26,45	0,12
42.		2020	28,05	28,90	28,34	25,78	0,13
43.	Kab. Kudus	2018	27,88	29,06	28,30	26,66	0,17
44.		2019	27,89	29,13	28,35	26,35	0,16
45.		2020	27,80	29,17	28,57	26,13	0,19
46.	Kab. Magelang	2018	27,97	28,78	28,54	26,94	0,14

47.		2019	28,00	28,82	28,57	26,68	0,16
48.		2020	27,92	28,86	28,28	26,09	0,14
49.	Kab. Pati	2018	28,12	29,45	28,65	26,81	0,14
50.		2019	28,12	29,49	28,69	26,73	0,13
51.		2020	28,04	29,46	28,47	26,48	0,14
52.	Kab. Pekalongan	2018	27,88	28,65	28,40	26,79	0,15
53.		2019	27,91	28,74	28,41	26,57	0,16
54.		2020	27,82	28,75	28,64	26,21	0,17
55.	Kab. Pemalang	2018	28,06	28,89	28,47	26,40	0,12
56.		2019	28,10	28,96	28,58	26,57	0,13
57.		2020	28,02	28,97	28,35	26,56	0,13
58.	Kab. Purbalingga	2018	27,85	28,59	28,29	26,32	0,15
59.		2019	27,87	28,68	28,36	26,29	0,15
60.		2020	27,77	28,65	28,61	25,59	0,16
61.	Kab. Purworejo	2018	27,85	28,65	28,39	26,63	0,14
62.		2019	27,89	28,73	28,41	26,51	0,13
63.		2020	27,83	28,77	28,27	26,26	0,14
64.	Kab. Rembang	2018	27,53	28,37	28,23	26,46	0,17
65.		2019	27,68	28,39	28,25	26,06	0,17
66.		2020	27,64	28,48	28,39	25,76	0,17
67.	Kab. Semarang	2018	27,90	29,11	28,41	26,73	0,18
68.		2019	27,93	29,18	28,47	26,70	0,19
69.		2020	27,85	29,22	28,24	26,11	0,20
70.	Kab. Sragen	2018	27,96	28,85	28,44	26,78	0,15
71.		2019	27,99	29,00	28,37	26,24	0,16
72.		2020	27,93	29,04	28,42	26,32	0,18
73.	Kab. Sukoharjo	2018	27,83	29,19	28,35	26,69	0,21
74.		2019	27,85	29,28	28,38	26,58	0,21
75.		2020	27,78	29,37	28,39	26,20	0,23
76.	Kab. Tegal	2018	28,05	28,79	28,58	26,76	0,15
77.		2019	28,09	28,85	28,63	26,80	0,16
78.		2020	28,02	28,91	28,36	26,24	0,17
79.	Kab. Temanggung	2018	27,70	28,76	28,14	25,95	0,15
80.		2019	27,76	28,81	28,24	26,13	0,15
81.		2020	27,68	28,79	28,55	25,35	0,17
82.	Kab. Wonogiri	2018	28,06	28,87	28,44	26,73	0,12
83.		2019	28,10	28,95	28,53	27,06	0,12
84.		2020	28,00	28,97	28,21	26,40	0,12
85.	Kab. Wonosobo	2018	27,76	28,75	28,25	26,67	0,12
86.		2019	27,84	28,85	28,34	26,79	0,12
87.		2020	27,75	28,87	28,45	26,22	0,13
88.	Kota Magelang	2018	27,07	28,98	27,57	26,19	0,28
89.		2019	27,08	29,02	27,63	26,33	0,28
90.		2020	26,99	29,06	28,26	25,48	0,31
91.	Kota Pekalongan	2018	27,10	28,53	27,51	25,71	0,20
92.		2019	27,14	28,68	27,58	25,93	0,22
93.		2020	27,06	28,70	27,41	25,57	0,24
94.	Kota Salatiga	2018	27,05	28,77	27,55	26,13	0,23
95.		2019	27,07	28,75	27,57	25,94	0,25
96.		2020	26,98	28,77	27,57	25,88	0,25
97.	Kota Semarang	2018	27,99	31,06	29,14	27,84	0,43
99.		2019	28,18	30,53	29,16	27,68	0,45
99.		2020	28,14	30,68	29,05	26,95	0,46

100.	Kota Surakarta	2018	27,72	29,68	28,28	26,98	0,28
101.		2019	27,74	30,09	28,33	27,02	0,28
102.		2020	27,68	30,13	28,13	26,25	0,27
103.	Kota Tegal	2018	27,12	28,51	27,54	25,46	0,28
104.		2019	27,19	28,51	27,68	25,84	0,28
105.		2020	27,16	28,51	27,68	25,72	0,26

Lampiran 9 : Hasil Uji Statistik Deskriptif

	KKD	DP	UPD	BD	BM
Mean	0.177619	27.84630	29.03035	28.37458	26.45960
Median	0.160000	27.91013	28.95021	28.40658	26.54841
Maximum	0.460000	28.29389	31.06407	29.16443	27.83678
Minimum	0.100000	26.98102	28.36501	27.40582	25.34905
Std. Dev.	0.065229	0.317817	0.440318	0.338409	0.467422
Skewness	2.272439	-1.364763	2.016846	-0.953201	-0.178928
Kurtosis	9.317561	4.341931	8.766364	4.504590	3.226218
Jarque-Bera	264.9828	40.47353	216.6571	25.80445	0.784154
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000002	0.675652
Sum	18.65000	2923.862	3048.186	2979.331	2778.258
Sum Sq. Dev.	0.442505	10.50479	20.16352	11.91014	22.72227
Observations	105	105	105	105	105

Lampiran 10 : Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: KKD

Method: Panel Least Squares

Date: 02/15/23 Time: 08:28

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.540817	0.317444	1.703664	0.0915
DP	-0.208236	0.024195	-8.606500	0.0000
UPD	0.102328	0.009951	10.28286	0.0000
BD	0.078223	0.022611	3.459527	0.0008
BM	0.009268	0.010336	0.896690	0.3720
Root MSE	0.032366	R-squared		0.751425
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared		0.741482
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression		0.033166
Akaike info criterion	-3.928160	Sum squared resid		0.109996
Schwarz criterion	-3.801781	Log likelihood		211.2284
Hannan-Quinn criter.	-3.876949	F-statistic		75.57328
Durbin-Watson stat	0.426612	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 11 : Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: KKD

Method: Panel Least Squares

Date: 02/15/23 Time: 08:31

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.641586	0.445901	1.438855	0.1533
DP	-0.099990	0.017472	-5.722960	0.0000
UPD	0.062984	0.008904	7.073955	0.0000
BD	0.019892	0.008998	2.210721	0.0293
BM	-0.002740	0.004291	-0.638432	0.5247

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.007767	R-squared	0.985684
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared	0.977442
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression	0.009797
Akaike info criterion	-6.134916	Sum squared resid	0.006335
Schwarz criterion	-5.149159	Log likelihood	361.0831
Hannan-Quinn criter.	-5.735468	F-statistic	119.5859
Durbin-Watson stat	2.384704	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 12 : Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: KKD

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/15/23 Time: 08:32

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.509558	0.966965	0.526967	0.6000
DP	-0.033549	0.031303	-1.071748	0.2877
UPD	0.016889	0.013230	1.276608	0.2062
BD	0.016775	0.009149	1.833412	0.0713
BM	-0.013756	0.004756	-2.892306	0.0052

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.030194	0.9047
Idiosyncratic random		0.009797	0.0953

Weighted Statistics			
Root MSE	0.011584	R-squared	0.408610
Mean dependent var	0.032705	Adjusted R-squared	0.384954
S.D. dependent var	0.015136	S.E. of regression	0.011870
Sum squared resid	0.014091	F-statistic	17.27327
Durbin-Watson stat	1.521367	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	0.600314	Mean dependent var	0.177619
Sum squared resid	0.176863	Durbin-Watson stat	0.121209

Lampiran 13 : Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.764592	(34,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	299.709351	34	0.0000

Lampiran 14 : Hasil Uji Hausman

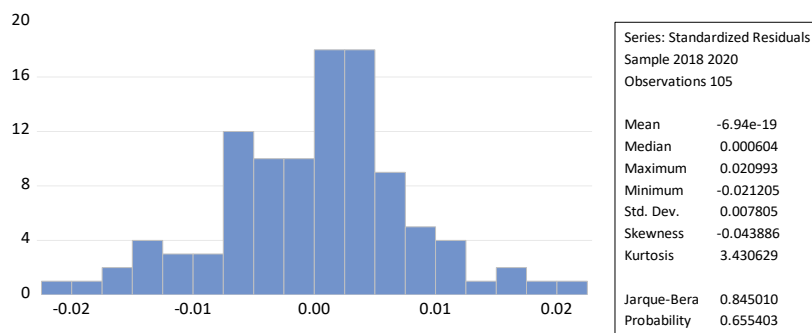
Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50.806264	4	0.0000

Lampiran 15 : Hasil Uji Normalitas



Lampiran 16 : Hasil Uji Multikolinearitas

	DP	UPD	BD	BM
DP	1.000000	0.347598	0.875016	0.653473
UPD	0.347598	1.000000	0.515493	0.541696
BD	0.875016	0.515493	1.000000	0.610877
BM	0.653473	0.541696	0.610877	1.000000

Lampiran 17 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 02/22/23 Time: 11:38

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.501955	0.393497	1.275626	0.2066
KKD	-0.029521	0.049986	-0.590583	0.5568
DP	-0.021840	0.012822	-1.703333	0.0933
UPD	0.003275	0.005438	0.602216	0.5491
BD	0.000550	0.003809	0.144411	0.8856
BM	0.000256	0.002050	0.124657	0.9012

Lampiran 18 : Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	3.465207	Durbin-Watson stat	2.039022
Prob(F-statistic)	0.336824		

Lampiran 19 : Hasil Uji F

Root MSE	0.007767	R-squared	0.985684
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared	0.977442
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression	0.009797
Akaike info criterion	-6.134916	Sum squared resid	0.006335
Schwarz criterion	-5.149159	Log likelihood	361.0831
Hannan-Quinn criter.	-5.735468	F-statistic	119.5859
Durbin-Watson stat	2.384704	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 20 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.007767	R-squared	0.985684
Mean dependent var	0.177619	Adjusted R-squared	0.977442
S.D. dependent var	0.065229	S.E. of regression	0.009797
Akaike info criterion	-6.134916	Sum squared resid	0.006335
Schwarz criterion	-5.149159	Log likelihood	361.0831
Hannan-Quinn criter.	-5.735468	F-statistic	119.5859
Durbin-Watson stat	2.384704	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 21 : Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.641586	0.445901	1.438855	0.1533
DP	-0.099990	0.017472	-5.722960	0.0000
UPD	0.062984	0.008904	7.073955	0.0000
BD	0.019892	0.008998	2.210721	0.0293
BM	-0.002740	0.004291	-0.638432	0.5247

Lampiran 22 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tyahayu Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 09 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jurang Dondong 01/02, Glintang, Sambu, Boyolali
No HP : 081227008447
Email : tyahayu959@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Mi Wonotono 2005-2011
2. MtsN 8 Boyolali 2011-2014
3. MAS Al-Basyariyah 2014-2018
4. UIN RMS Surakarta Angkatan tahun 2019

Lampiran 23 : Cek Plagiarisme

Tyahayu Pratiwi

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX**18%**
INTERNET SOURCES**2%**
PUBLICATIONS**23%**
STUDENT PAPERS